



# MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : ITJ-0T.02.01-2 Tanggal 4 Januari 2024

Penyesuaian Indikator Kinerja sebagaimana dalam SK IRJEN No.ITJ-01.PR.01.01  
Tanggal 5 Februari 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis ITJEN Th.2024

**bangga  
melayani  
#bangsa**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**REFORMASI PEMAJUAN  
HUKUMI**  
HAK ASASI MANUSIA

**MANAJEMEN RISIKO INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



**2024**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR: ITJ-31.KP.04.01 TAHUN 2024  
TENTANG  
MANAJEMEN RISIKO  
PADA UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa Inspektorat Jenderal sebagai pemilik risiko utama berkewajiban menyusun penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Jenderal tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2023;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/DS/ 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652);
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 399);
  10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ lembaga/Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900).

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan apabila terdapat perubahan sasaran, tujuan, maupun Indikator Kinerja, untuk segera dilakukan penyesuaian.
- KEDUA : Piagam Manajemen Risiko sebagaimana terlampir dalam Lampiran-I Surat Keputusan ini merupakan bentuk Komitmen seluruh Pimpinan Tinggi, Auditor Utama dan seluruh jajaran Inspek Jenderal, menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Menunjuk Pejabat sebagai Unit Pemilik Risiko Unit Utama (UPR) Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam lampiran-II dan menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Tim Penyusun/Pembahas Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam lampiran-III Keputusan ini serta menetapkan Rencana Kerja Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran-IV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat yang ditunjuk sebagai Unit Pemilik Risiko Unit Utama (UPR) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas:
1. Menyusun Piagam Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam lampiran-I Keputusan ini;
  2. Menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko di Unit Utama;
  3. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Manajemensiko di Unit Utama;
  4. Melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik risiko masing-masing;
  5. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  6. Menatausahakan proses Manajemen Risiko.
- KELIMA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Tim Penyusun/Pembahas/Pemantau Manajemen Risiko mempunyai tugas membantu Tim Unit Pemilik Risiko dalam proses:
1. Penetapan Tujuan berdasarkan pada Program, Sasaran,

Indikator pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas fungsi dan capaian kinerja;

2. Penilaian/Asesmen Risiko meliputi:
  - a. Identifikasi Risiko dengan menetapkan pernyataan risiko, kriteria risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, dampak risiko dan pengendalian risiko. Untuk kemudian hasil identifikasi berupa Daftar Risiko;
  - b. Analisis Risiko dengan menetapkan tingkat kemungkinan, tingkat dampak, tingkat risiko, dan profil risiko. Untuk kemudian hasil analisis risiko berupa Peta Risiko;
  - c. Evaluasi risiko dengan menetapkan prioritas risiko, toleransi risiko, indikator risiko, dan batas aman risiko;
  - d. Penanganan/*Treatment* Risiko dengan menetapkan opsi penanganan risiko, kegiatan pengendalian risiko, jadwal penanganan risiko dan penanggung jawab penanganan risiko serta cadangan risiko bila ada;
  - e. Pemantauan atas penanganan risiko minimal per semester dalam satu tahun anggaran bersama dengan Pejabat yang tergabung dalam Unit Pemilik Risiko Inspektorat Jenderal;
3. Menyusun Laporan Pemantauan Risiko minimal per semester paling lambat tanggal 10 semester berikutnya, untuk mengetahui tren risiko selama satu tahun berjalan dan menyampaikan kepada Inspektur Jenderal serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Membantu Unit Pemilik Risiko saat dilakukan evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi dan Evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh APIP Inspektorat Wilayah I, dalam hal menyediakan data dukung serta pembahasan bersamadengan APIP.
5. Melakukan proses komunikasi dan konsultasi dalam setiap tahap proses manajemen risiko.

- KEENAM : Menetapkan Pegawai yang telah memiliki Sertifikasi Kompeten Manajemen Risiko menjadi Bagian dari Tim Penyusun Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Tahun 2024.
- KETUJUH : Menetapkan Pegawai yang mengikuti kegiatan pembahasan konsep Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Th.2024 pada tanggal 24 Januari 2024 bertempat di di BPSDM Hukum dan HAMDepok, menjadi Bagian dari Tim Penyusun Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Rencana Kerja Unit Pemilik Risiko dan Tim Penyusun/ Pembahas / Pemantau Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran-III Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2024

INSPEKTUR JENDERAL,



RAZILU

NIP 196511281991031002



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LAMPIRAN I  
 Keputusan Inspektur Jenderal  
 Nomor : ITJ-31.KP.04.01 TAHUN 2024  
 Tanggal : 29 Januari 2024



**INSPEKTORAT JENDERAL  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA**  
 NOMOR: ITJ-OT.02.01-2 TANGGAL 4 JANUARI 2024

Dalam rangka pencapaian sasaran unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya menyatakan :

1. Piagam Manajemen Risiko merupakan hasil penguangan pelaksanaan proses Manajemen Risiko yang meliputi Penetapan Tujuan, Profil dan Peta Risiko serta Rencana Penanganan Risiko;
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait mengenai Penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Rencana penanganan risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin; dan
4. Untuk meningkatkan efektifitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

INSPEKTUR JENDERAL

*[Signature]*

RAZILU  
 NIP 196511281991031002

INSPEKTORAT WILAYAH I

*[Signature]*

IKA YUSANTI  
 NIP 197112071993032002

INSPEKTORAT WILAYAH V

*[Signature]*

PRIA WIBAWA  
 NIP 196507281988031001

SEKRETARIS INSPEKTORAT  
 JENDERAL

*[Signature]*

YAYAH MARIANI  
 NIP 19640311994032007

INSPEKTORAT WILAYAH IV

*[Signature]*

BAMBANG SETYABUDI  
 NIP 196911281997031001

INSPEKTORAT WILAYAH II

*[Signature]*

LILIK SUJANDI  
 NIP 197110171995031001

INSPEKTORAT WILAYAH VI

*[Signature]*

SKI YULIANI  
 NIP 196907221998032001

INSPEKTORAT WILAYAH III

*[Signature]*

IWAN SANTOSO  
 NIP 197004301991031001

AUDITOR UTAMA

*[Signature]*

BUDI  
 NIP 196211251989031002



## LAMPIRAN-II

Keputusan Inspektur Jenderal

Nomor : ITJ-31.KP.04.01 TAHUN 2024

Tanggal : 29 Januari 2024

**UNIT PEMILIK RISIKO UNIT UTAMA (UPR) INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM TIM
1.	Inspektur Jenderal	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua merangkap Anggota
3.	Nanih Kusnani Kepala Bagian Program dan Pelaporan	Sekretaris merangkap Anggota (Sertifikasi CRMO, CRA, CRGP, QRMA)
4.	Ika Yusanti Inspektur Wilayah I	Anggota
5.	Lilik Sujandi Inspektur Wilayah II	Anggota (Sertifikasi CGRE)
6.	Iwan Santoso Inspektur Wilayah III	Anggota
7.	Bambang Setyabudi Inspektur Wilayah IV	Anggota (Sertifikasi CGRE)
8.	Pria Wibawa Inspektur Wilayah V	Anggota
9.	Sri Yuliani Inspektur Wilayah VI	Anggota

Sumber data : Permenkumham No.5 Th.2018



Inspektur Jenderal,

RAZILU

NIP 196511281991031002

## LAMPIRAN-III

Keputusan Inspektur Jenderal

Nomor : ITJ-31.KP.04.01 TAHUN 2024

Tanggal: 29 Januari 2024

**TIM PENYUSUN/PEMBAHAS/PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO  
UNIT PEMILIK RISIKO UTAMA (UPR) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN 2024**

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua	-
2.	Budi Auditor Ahli Utama	Pengarah	Peserta pembahasan konsep MR Itjen tanggal 24 Januari 2024 (SP Irjen No.ITJ-KP.04.01-102 tanggal 17 Januari 2024)
3.	Nanih Kusnani Kepala Bagian Program dan Pelaporan	Sekretaris I	(Sertifikasi CRMO, CRA, CRGP, QRMA)
4.	Lucky Anggara Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris II	Peserta pembahasan konsep MR Itjen tanggal 24 Januari 2024
5.	Maddalena Saragi Auditor Madya	Anggota	Sertifikasi CRA
6.	Fandyla Wahyu Sasongko Auditor Madya	Anggota	Sertifikasi CRMO
7.	Niken Ayu Kesuma Ningtyas Auditor Madya	Anggota	Sertifikasi CRMO
8.	Ristianti Muji Kartikasari Auditor Madya	Anggota	Sertifikasi CRA
9.	Tessa Leo Marlino Auditor Muda	Anggota	Sertifikasi CRMO
10.	Arman Syah Razak Auditor Muda	Anggota	Sertifikasi CRA
11.	Surya Narendra Auditor Pertama	Anggota	Sertifikasi CRA
12.	Suciati Kristiasari Auditor Pertama	Anggota	Sertifikasi CRMO
13.	Nindra Wahyu Hapsari Auditor Pertama	Anggota	Sertifikasi CRA

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
14.	Latiefah Kusumawati Auditor Pertama	Anggota	Sertifikasi CRMO
15.	Erwien Prabowo Auditor Pertama	Anggota	Sertifikasi CRMO
16.	Gesang Widiatmoko Auditor Pertama	Anggota	Sertifikasi CRMO
17.	Fera Arindra Tri Anestya Auditor Pertama	Anggota	Sertifikasi CRMO
18.	Raja Asrubi Eka Putra Auditor Pertama	Anggota	Sertifikasi CRMO
19.	Anton Parasian Auditor Madya	Anggota	Peserta pembahasan konsep MR Itjen tanggal 24 Januari 2024 (SP Irjen No.ITJ-KP.04.01-102 tanggal 17 Januari 2024)
20.	Doktor Gurning Auditor Madya	Anggota	Peserta pembahasan konsep MR Itjen tanggal 24 Januari 2024 (SP Irjen No.ITJ-KP.04.01-102 tanggal 17 Januari 2024)
21.	Nopalisa Egitulas Vembilan Auditor Madya	Anggota	sda
22.	Agus Priyo Atmoko Auditor Muda	Anggota	sda
23.	Patria Ratna Sari Auditor Pertama	Anggota	sda
24.	Devina Ika Pratiwi Auditor Pertama	Anggota	sda
25.	David Maradona Lumban Batu Auditor Pertama	Anggota	sda
26.	Anton Kurniawan Auditor Pertama	Anggota	sda
27.	Metaria Tri Sandi Eda Auditor Pertama	Anggota	sda
28.	Henni Maria Marpaung Auditor Pertama	Anggota	sda
29.	Arnanda Arvi Untari Auditor Pertama	Anggota	sda

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
30.	Eem Nurmanah Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Anggota	sda
31.	Slamet Iman Santoso Pranata Komputer Ahli Madya	Anggota	sda
32.	Tri Sayekti Ningsih Perencana Ahli Muda	Anggota	sda
32.	Baneriamama Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota	sda
33.	Dian Saptawati Arsiparis Ahli Muda	Anggota	sda
34.	Een Setia Suharjito Analisis Anggaran Ahli Muda	Anggota	sda
35.	Parlindungan Donni Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah	Anggota	sda
36.	Lusi Handayani Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda	Anggota	sda
37.	Januarino Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota	sda
38.	Rifaldy Mahardika Putra Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota	sda
39.	Ida Bagus Mahayoga Raharja Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota	sda
40.	Euis Yulianti Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	sda
41.	Simon Halomoan Analisis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer	Anggota	sda
42.	Lodi Handoko Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Anggota	sda
43.	Ivan Satria Nugraha Penata Keuangan	Anggota	sda
44.	Erviana Rahayu Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Anggota	sda
45.	Febry Edward Pengelola Program dan Kegiatan	Anggota	Peserta pembahasan konsep MR Itjen tanggal 24 Januari 2024 (SP Irjen No.ITJ-

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
			KP.04.01-102 tanggal 17 Januari 2024)
46.	Yudhi Hervino Analisis Kelembagaan	Anggota	sda
47.	Nia Wulandari Analisis Kelembagaan	Anggota	sda
48.	Tiara Jasmine Nabilla Penata Keuangan	Anggota	sda
49.	Renata Ratnasari Analisis Pengembangan Pegawai	Anggota	sda
50.	Tri Wibowo Pengelola Data Kepegawaian	Anggota	sda
51.	Lia Aulia Siringo Ringo Penyusun Kebutuhan Sarana Prasarana	Anggota	sda
52.	Tiarma Rosa Sinaga Auditor Madya		Diusulkan oleh Inspektur Wilayah I
53.	Kurniawan Auditor Pertama		Diusulkan oleh Inspektur Wilayah II
54.	Dhony Alfianto Auditor Pertama		Diusulkan oleh Inspektur Wilayah III
55.	Agil Fahlefi Auditor Pertama		Diusulkan oleh Inspektur Wilayah IV
56.	Bambang Purwantho Auditor Madya		Diusulkan oleh Inspektur Wilayah V
57.	Agung Natanael Auditor Madya		Diusulkan oleh Inspektur Wilayah V
58.	Raden Bagus Wasito Utomo Auditor Muda		Diusulkan oleh Inspektur Wilayah V
59.	Fahmi Yusuf		Diusulkan oleh Kepala Bagian Umum
60.	Maria Cathalina Corina Susanto Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama		Diusulkan oleh Analisis SDM Aparatur Madya
61.	Apriliya Wulandari Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama		Diusulkan oleh Analisis SDM Aparatur Madya
62.	Prisi Khairani Arief Analisis Hukum Pertama		Telah mengikuti Pelatihan Manajemen Risiko (BPKP)
63.	Erwin Penyusun Laporan Keuangan		Diusulkan oleh Pengelola APBN Madya

Keterangan :

a. Susunan Tim Penyusun adalah :

1) Pegawai yang memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko meliputi sertifikasi :

CRMO = *Certified Risk Management Officer*

CRA = *Certified Risk Assosiated*

CRGP = *Certified Risk Governance Professional*

QRMA = *Qualified Risk Management Analyst*

2) Seluruh peserta kegiatan Internalisasi Capaian Kinerja Th.2023 dan Penyusunan Dokumen Kinerja Th.2024, bertempat di BPSDM Hukum dan HAM Conere tanggal 22 sd 26 Januari 2024 (Surat Perintah Inspektur Jenderal No.ITJ-KP.04.01-102 tanggal 17 Januari 2024).

3) Pegawai yang diusulkan oleh Inspektur Wilayah, kepala Bagian dan JFT Ahli Madya.



Inspektur Jenderal,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line.

RAZILU

NIP 196511281991031002

## LAMPIRAN-IV

Keputusan Inspektur Jenderal

Nomor : ITJ-31.KP.04.01 TAHUN 2024

Tanggal : 29 Januari 2024

**RENCANA KERJA UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
TAHUN 2024**

NO	KEGIATAN	BULAN												OUTPUT	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Analisa Hasil Pemantauan Manajemen Risiko Semester II Tahun 2023														Laporan Pemantauan Risiko Semester II Tahun 2023
2.	Penandatanganan Piagam Manajemen Risiko ITJEN														Piagam Manajemen Risiko
3.	Pembahasan pertama konsep Manajemen Risiko ITJEN														Konsep Manajemen Risiko Tahun 2024
4.	Permohonan Masukan / Saran/Perbaikan/Koreksi atas konsep Manajemen Risiko hasil pembahasan awal bertempat di BPSDM														Masukan/ saran/ Perbaikan Manajemen Risiko Tahun 2024
5.	Penyusunan Surat Keputusan IRJEN tentang UPR dan Tim Penyusun/Pembahas/Pemantau Manajemen Risiko ITJEN														SK Irjen tentang UPR dan Tim Penyusun Manajemen Risiko Tahun 2024
6.	Perbaikan konsep Manajemen Risiko berdasarkan Masukan/ saran														Konsep Manajemen Risiko Tahun 2024
7.	Penetapan Manajemen Risiko														Surat Keputusan Irjen

NO	KEGIATAN	BULAN												OUTPUT	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8.	Pelaksanaan Manajemen Risikoserta proses Konsultasi dan komunikasi selama satu tahun anggaran														Seluruh pegawai
9.	Pembahasan Pemantauan Risiko Semester I														Tim serta Perwakilan ITWIL dan Sekretariat ITJEN
9.	Pengumpulan data dukung hasilPemantauan Manajemen Risiko Semester I														Tim
11.	Penyusunan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Semester I														Sekretaris UPR
12.	Pembahasan Pemantauan Risiko Semester II														Tim serta Perwakilan ITWIL dan Sekretariat ITJEN







# PIAGAM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024

PPL itjen kemenkumham



## INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: ITJ-OT.02.01-2 TANGGAL 4 JANUARI 2024

Dalam rangka pencapaian sasaran unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya menyatakan :

1. Piagam Manajemen Risiko merupakan hasil penguangan pelaksanaan proses Manajemen Risiko yang meliputi Penetapan Tujuan, Profil dan Peta Risiko serta Rencana Penanganan Risiko;
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait mengenai Penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Rencana penanganan risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin; dan
4. Untuk meningkatkan efektifitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

INSPEKTUR JENDERAL

*Razili*

RAZILU  
NIP. 196511281991031002

INSPEKTORAT WILAYAH I

*Ika Yusantri*  
IKA YUSANTI  
NIP. 197112071993032002

INSPEKTORAT WILAYAH V

*Pria Wibawa*  
PRIA WIBAWA  
NIP. 196507281988031001

SEKRETARIS INSPEKTORAT  
JENDERAL

*Yayah Mariani*  
YAYAH MARIANI  
NIP. 196403111994032007

INSPEKTORAT WILAYAH IV

*Bambang Setyabudi*  
BAMBANG SETYABUDI  
NIP. 196911281997031001

INSPEKTORAT WILAYAH II

*Lilik Susandi*  
LILIK SUSANDI  
NIP. 197110171995031001

INSPEKTORAT WILAYAH VI

*Sari Yuliani*  
SARI YULIANI  
NIP. 196907221998032001

INSPEKTORAT WILAYAH III

*Iwan Santoso*  
IWAN SANTOSO  
NIP. 197004301991031001

AUDITOR UTAMA

*Budi*  
BUDI  
NIP. 196211251989031002



## **TAHAP-1:**

### **PENATAPAN TUJUAN**

(Menetapkan Program, Kegiatan, Sasaran Strategis,  
Indikator Kinerja dan Permasalahan)

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal

Nomor : ITJ.OT-02.01-2

Tanggal : 04 Januari 2023

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

edit 14 April , perubahan renstra itjen 2024

<b>PENETAPAN TUJUAN</b>				
<b>Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Jenderal</b>				
<b>Periode Penerapan : 2024</b>				
No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	Program Dukungan Manajemen Unit ITJEN	3 SP WA.5 Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi terkait Pengawasan Intern Pemerintah	4 ISP WA 5.1.Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal Kemenkumham.	5 Masih terdapat cattaan dalam Opini WTP yang diberikan BPK atas Laporan keuangan kemenkumham
2			ISP WA 5.2.Nilai Komponen Struktur dan Proses pada Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Pengelolaan BMN yang belum optimal
3			ISP WA 5.3.Indeks Manajemen Risiko	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif
4			ISP WA 5.4.Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Pemenuhan data dukung SAKIP belum memadai / Satker belum optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP
5			ISP WA 5.5.Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pemenuhan data dukung RKT RB dan RB Messo belum memadai
6				Pemenuhan data dukung belum memadai dan tidak memenuhi kriteria nilai minimal dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
7				Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun
8	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I,II,III,IV,V, VI.	SP WA.5 SK 1563 Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah	ISK 1563.1 Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah.	Belum seluruh proses kegiatan pada Itjen telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuaian beserta mitigasinya yang tepat

<b>PENETAPAN TUJUAN</b>				
<b>Unit Pemilik Risiko</b> : Inspektorat Jenderal				
<b>Periode Penerapan</b> : 2024				
No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
9			ISK 1563.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah	Pemenuhan data dukung KAPIP belum memadai
10			ISK 1563.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah	
11			ISK 1563.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah.	Prosedur pencegahan dan penanganan bencana belum dipahami oleh seluruh pegawai
12				Hasil survei Persepsi Integritas dari KPK belum mencerminkan tingkat integritas Kemenkumham
13				Pelaksanaan RB ITJEN belum terdokumentasi dengan baik
14				Pendokumentasian Pelaksanaan implementasi SPTP belum optimal di laksanakan
15	Kegiatan Dukungan Manajemen (Sekretariat ITJEN)	SP WA.5 SK 1569.1 Meningkatnya Kapabilitas APIP Kemenkumham.	ISK 1569.1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kemenkumham	Manajemen Risiko ITJEN hanya sebagai dokumen
16		SP WA.4 SK 1569.2 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal	ISK 1569.2.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal.	Efektifitas kerjasama belum optimal
				Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian indikator kinerja instansi dan individu

PENETAPAN TUJUAN				
Unit Pemilik Risiko Periode Penerapan		: Inspektorat Jenderal : 2024		
No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
17		SP WA.4 SK 1569.2 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal	ISK 1569.2.1 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal terhadap Layanan Kesekretariatan	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM ITJEN
18				Layanan kepegawaian belum optimal
19				Tata nilai Kemenkumham belum optimal ditanamkan pada setiap ASN
20				Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal
21				Manajemen aset yang belum optimal
22				Keterlambatan pemrosesan surat masuk melalui SISUJMAKER
23				Kurangnya informasi tentang data arsip aktif dan in aktif
24				Inventarisasi BMN tidak update
25				Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal
26				Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan
27				Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan
28				Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITW/IL
29				Salah saji yang material pada Laporan Keuangan Itjen
30				Data SAIBA dan BMN tidak sinkron
31				Pembayaran tagihan pihak ketiga/penyedia belum tepat waktu
32				Salah saji dalam menyusun laporan realisasi belanja pegawai
33				Masih terdapat Bendahara belum memiliki kompetensi yang memadai

<b>PENETAPAN TUJUAN</b>				
<b>Unit Pemilik Risiko</b>		<b>: Inspektorat Jenderal</b>		
<b>Periode Penerapan</b>		<b>: 2024</b>		
<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Permasalahan</b>
1	2	3	4	5
34				UP (uang persediaan) tidak cukup tersedia sesuai dengan kebutuhan dalam RAB dan KAK pelaksanaan kegiatan
35				Masih terdapat dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan benar
36				Kurang optimalnya peran POKJA Tim RB, SAKIP dan SPIP ITJEN yang telah ditetapkan
37				Pagu belanja non operasional untuk pelaksanaan tuisi belum optimal
38				Terdapat keterlambatan dalam memberikan layanan kepegawaian
39				Panitia / Pokja pengadaan belum optimal memahami proses pengadaan
40				Terjadinya benturan kepentingan dalam percepatan pemberian anggaran kegiatan
41				Belum memiliki grand design Teknologi Informasi Pengawasan
42				Perbedaan data temuan
43				Adanya benturan kepentingan dalam proses pemberian surat keterangan catatan cela
44				Layanan SIPIDU belum optimal
45				IACM/KAPIP level 4 belum tercapai
46				PKPT berbasis risiko belum diterapkan secara optimal sesuai Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR)
47				Belum seluruh satuan kerja menyusun Manajemen Risiko
48				Terjadinya fraud ataupun Operasi Tangkap tangan
49				Kurangnya respon satuan kerja untuk tindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP terkait temuan pengembalian ke kas negara dan temuan administrasi
50				Kurangnya respon satuan kerja untuk tindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait temuan Kerugian negara dan administrasi

PENETAPAN TUJUAN				
Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Jenderal				
Periode Penerapan : 2024				
No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
51				Pemenuhan data dukung komponen pengungkit dan survei komponen hasil belum memadai
52				Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat
53				Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun

edit 14 April penyesuaian Renstra Perubahan 2024





## PENILAIAN RISIKO (*RISK ASSESSMENT*)

1. Melakukan Identifikasi Risiko dengan menetapkan Potensi Risiko, Kriteria, Pemilik, Penyebab, Sumber, Dampak, Pihak Yang Terkena Dampak, Pengendalian Intern Yang Ada, Sisa Risiko). Proses Identifikasi menghasilkan **Register Risiko**.
2. Melakukan Analisis Risiko dengan mengukur level Kemungkinan Terjadi dan Dampak bila Terjadi, Tingkat Risiko dan Profil Risiko. Proses ini menghasilkan **Peta Risiko**.
3. Melakukan Evaluasi Risiko dengan menetapkan Prioritas, Toleransi, indikator risiko serta batas aman dari indikator risiko.  
Proses ini menghasilkan Prioritas, Indikator dan batas aman risiko

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO (REGISTER RISIKO)												
Risk Event Nu.	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak			Pihak yang Terkena	Sisa Risiko
		Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Uraian	C/ UC	Sumber	Uraian	Uraian		
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Masih terdapat callaan dalam Opini WTP yang diberikan BPK atas Laporan keuangan kementerian	Opini atas laporan keuangan kementerian tidak WTP	Risiko Strategis IKU/ Risiko reputasi	IT/JEN	Sistem pengendalian intern atas pengelolaan BMN dan keuangan belum efektif dan efisien	Internal dan eksternal	C dan UC	penurunan kepercayaan publik terhadap kementerian	Kemendikam	Menjalankan Quality Assurance melalui reviu Laporan keuangan, reviu RKBMN, reviu RKAKL, audit pengelolaan keuangan, audit pengelolaan BMN, audit barang dan jasa, reviu PABPJ	15	
2	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substansif	Adanya Berita Viral negatif di kementerian	Risiko Strategis IKU/ Risiko reputasi	IT/JEN	Belum seluruh satker dapat menerapkan SPIP Terintegrasi	Internal	C	Suati memperoleh SPIP level 3	Kemendikam	Evaluasi maturitas SPIP oleh Itwi I, workshop SPIP, penyusunan Perenarapan manajemen risiko	Adanya Berita Viral negatif di kementerian	
3	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan program)	Risiko fraud	IT/JEN	terdapat pihak lain dalam menentukan program/ kegiatan (termasuk anggaran kegiatan).	Internal	C	Anggaran tidak sesuai dengan peruntukan / kebutuhan	Inspektoral Jenderal		Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan program)	
4	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan pengadaan barang jasa)	Risiko fraud	IT/JEN	Terdapat pihak lain dalam menentukan pemenang tender/pengadaan barang/jasa	Internal	C	Barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Inspektoral Jenderal		Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan pengadaan barang jasa)	
5	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan pemberian rekomandasi)	Risiko fraud	IT/JEN	Terdapat pihak lain dalam pemberian rekomendasi teknis	Internal	C	Rekomendasi merugikan pihak	Inspektoral Jenderal		Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan pemberian rekomandasi)	
6	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan kebijakan)	Risiko fraud	IT/JEN	Terdapat pihak lain dalam negosiasi terkait sanksi/denda pengguna layanan.	Internal	C	Ketidaksiapan pgguna layanan WBS jika	Inspektoral Jenderal	1. Pemberian sanksi hukuman disiplin 2. Penandatangan fakta integritas 3. Komitmen deklarasi pembangunan zona integritas WBIK/WBBM	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan kebijakan)	
7	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam pengelolaan SDM)	Risiko fraud	IT/JEN	Terdapat pihak lain dalam kebijakan SDM (rekrutmen pegawai non-ASN, promosi pegawai, rotasi pegawai, mutasi pegawai, diktat pegawai)	Internal	C	program pemerintah tidak berjalan optimal	Inspektoral Jenderal		Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam pengelolaan SDM)	
8	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (vendor memberikan sesuatu kepada pihak terkait)	Risiko fraud	IT/JEN	Pengaru pemberian pada mutasi: promosi (Jual beli jabatan) dikarenakan adanya kekerabatan/ nepotisme, adanya kesamaan almanater /golongan/ organisasi mendapat respons negatif (dikucikan, diberi sanksi, dimutasi, kanter dihambat, dll) jika pegawai melaporkan adanya praktik jual beli jabatan	Internal dan Eksternal	C/ UC	-barang/jasa tidak sesuai spesifikasi -kualitas barang/jasa rendah -penurunan indeks SPIP dan RB -Kementerian	Inspektoral Jenderal	1. Pemberian sanksi hukuman disiplin 2. Penandatangan fakta integritas 3. Komitmen deklarasi pembangunan zona integritas WBIK/WBBM 4. penggunaan escalatog	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (vendor memberikan sesuatu kepada pihak terkait)	
9	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemilihan barjas diatur)	Risiko fraud	IT/JEN	penilaian barang/jasa diatur	Internal	C				Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemilihan barjas diatur)	
10	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (kualitas barang tidak sesuai)	Risiko fraud	IT/JEN	kualitas barang tidak sesuai	Internal	C				Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (kualitas barang tidak sesuai)	

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO (REGISTER RISIKO)												
PENETAPAN TUJUAN	Permasalahan	Risiko				Penyebab			Dampak		Sisa Risiko	
		Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Pengendalian Intern yang Ada		
Risk Event Nu.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemenang tender punya hubungan kekerabatan)	Risiko fraud	IT/JEN	pemenang punya hubungan kekerabatan	Internal	C					
11	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemenang tender punya hubungan kekerabatan)	Risiko fraud	IT/JEN	hasil pengadaan tidak memberikan manfaat	Internal	C					Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemenang tender punya hubungan kekerabatan)
12	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemenang tender punya hubungan kekerabatan)	Risiko fraud	IT/JEN	Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan barang/jasa	Internal	C					Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemenang tender punya hubungan kekerabatan)
13	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemenang tender punya hubungan kekerabatan)	Risiko fraud	IT/JEN	Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan barang/jasa	Internal	C					Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemenang tender punya hubungan kekerabatan)
14	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan anggaran	Risiko fraud	IT/JEN	penyalahgunaan anggaran kantor (perjalanan dinas, transport lokal, honor)	Internal	C	keugian negara	Inspektoral Jenderal	SOP pengelolaan keuangan		Fraud dalam pengelolaan anggaran
15	Masih terdapat catatan dalam Opini WTP yang diberikan BPK atas Laporan keuangan kementerian	Kurang teridentifikasinya risiko terkait pengelolaan keuangan, barang jasa dalam kegiatan pendampingan LK, Reviu LK, Reviu RKAKL, Reviu BMN, Audit Barang Jasa oleh APIP	Risiko Strategis/ Risiko kepatuhan	IT/JEN	Temuan pihak ketiga yang sulit ditindaklanjuti	Internal dan eksternal	C dan UC	Adanya kerugian negara dan ketidakpercayaan publik atas pengelolaan laporan keuangan kementerian	Kemen kumham	-Pemanfaatan temuan BPK - Rekon data temuan APIP dengan Saker - reviu RKBMN, reviu RKAKL, reviu LK, dan pendampingan penyusunan LK		Kurang teridentifikasinya risiko terkait pengelolaan keuangan, barang jasa dalam kegiatan pendampingan LK, Reviu LK, Reviu RKAKL, Reviu BMN, Audit Barang Jasa oleh APIP
16	Pemenuhan data dukung belum memadai dan tidak memenuhi kriteria nilai minimal dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM	Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM tidak sesuai dengan Target yang ditetapkan	Risiko Strategis/ Risiko Reputasi	IT/JEN	perbedaan persepsi pemenuhan data dukung antara Satuan Kerja, TPI dan TPN, khususnya terkait dengan Inovasi, Manajemen Media, Manajemen Risiko dan Indikator Kinerja yang berorientasi hasil belum memadai serta persepsi masyarakat terhadap IPK dan IKM pada satuan kerja masih rendah	Internal dan Eksternal	C	-Kemenkumham kurang optimal membangun Zona Integritas - kerja yang diuluskan oleh TPI memenuhi kriteria untuk mendapatkan Predikat WBK dan WBBM	Kemen kumham	Melakukan pendampingan, Sosialisasi dan Workshop Pembangunan ZI		Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM tidak sesuai dengan Target yang ditetapkan
17	Pemenuhan data dukung belum memadai dan tidak memenuhi kriteria nilai minimal dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	Risiko Operasional	Tim Saber Pungli IT/JEN	Kegiatan UPP belum terencana	Internal	C	-Terjadinya pungutan liar -Adanya OTT pegawai kementerian	Kemen kumham	UPP menjadi level output dalam poster anggaran		UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan
18	Pemenuhan data dukung SAKIP belum memadai / Saker belum optimal mendektarlanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai "A"	Risiko Strategis/ Risiko Reputasi	IT/JEN	Pengukuran Kinerja belum terintegrasi (belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Internal	C	Keidakpercayaan publik terhadap pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja kementerian	Kemen kumham	Evaluasi SAKIP, Reviu LAKP Kementerian, Workshop SAKIP		Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "A"
19	Pelaksanaan RB IT/JEN belum terdokumentasi dengan baik	RKT RB satuan kerja belum sepenuhnya terpenuhi 100% per tinjauan	Risiko Strategis/ Risiko Reputasi	IT/JEN	belum seluruh satuan kerja paham perubahan indikator RB dari 8 area perubahan menjadi RB General dan RB Tematik	Internal dan Eksternal	C	Keidakpercayaan publik terhadap implementasi reformasi birokrasi kementerian	Kemen kumham	Money RKT RB per tinjauan oleh APIP		RKT RB satuan kerja belum sepenuhnya terpenuhi 100% per tinjauan

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO (REGISTER RISIKO)											
Risk Event Nu.	Permasalahan	Risiko			Penyebab		Dampak		Pihak yang Terkena		Sisa Risiko
		Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Dala dukung ISO SMAP belum terdokumetasi dengan baik	Risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut	Risiko fraud / integritas	ITJEN	Tidak terpenuhinya Klausul sesuai Standar ISO 37001:2016	Internal	C	Penurunan Kredibilitas Ijen	Inspektoral Jenderal	14	Risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut
21	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif	pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Risiko fraud / integritas	ITJEN	adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari manipulasi laporan audit	Internal dan Eksternal	C dan UC	Penurunan Kredibilitas Ijen	Kemen kumham		Potensi pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya
22	Terjadinya fraud ataupun Operasi Tangkap tangan	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan/atau kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	Risiko Reputasi Risiko Kepatuhan	Inspektoral Wilayah	- Kurangnya informasi yang diperoleh auditor dan komunikasi dengan stakeholder; - Kurangnya kompetensi auditor; - Kurang tepatnya penerapan manajemen risiko satuan kerja	Internal	C	terjadi operasi tangkap tangan maupun kerugian negara	Kemen kumham		Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan/atau kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal
23	Belum seluruh satuan kerja menyusun Manajemen Risiko Kerja	Rendahnya tingkat penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja	Risiko Operasional	Inspektoral Wilayah	Belum seluruh satuan kerja memahami penerapan Manajemen risiko sesuai permenkumham	eksternal	UC	dapat mempengaruhi tingkat maturitas SPIP terintegrasi	Kemen kumham		Evaluasi penerapan Manajemen Risiko Rendahnya tingkat penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja
24	Manajemen Risiko ITJEN hanya sebagai dokumen	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Manajemen risiko belum menjadi bagian yang dianggap penting dalam pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Kinerja ITJEN tidak disusun berdasar penerapan manajemen risiko ITJEN	Inspektoral Jenderal		Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem
25	Hasil survei Persepsi Integritas dari KPK belum mencerminkan tingkat integritas Kemenkumham	menurunnya Integritas pelaksanaan tugas	Risiko fraud / integritas	Inspektoral Jenderal	pegawai takut menungkapkan bila melihat/mendengar : - kasus korupsi terjadi; - ada yang memberikan sesuatu untuk mutasi/promosi Adanya Nepotisme (suku, agama, kekerabatan dll) mempengaruhi pengambilan keputusan terdapat Pegawai mungkin menerima pemberian dari pengguna layanan terdapat penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Penilaian buruk dari pengguna layanan Nilai Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM menurun	ITJEN		menurunnya Integritas pelaksanaan tugas

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO (REGISTER RISIKO)											
Risk Event Nu.	Permasalahan	Risiko				Penyebab		Dampak		Sisa Risiko	
		Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	Salkur kurang respon dalam percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	Risiko Keuangan dan Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN dan Inspektorat Wilayah	-Adanya temuan BPK terkait kerugian negara yang dilakukan oleh pihak ketiga yang sulit ditindaklanjuti -adanya temuan tahun yang telah lama namun belum ada kesepakatan antara ITJEN dengan BPK tentang prosesnya -Perbedaan data SIFTL dengan database ITJEN	Internal dan Eksternal	C dan UC	Meurunnya kinerja ITJEN dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan terkait kerugian negara	Kemen kumham	Rekonsiliasi tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK secara berkala melalui mekanisme SPTTL	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak
27	Panitia / Pokja pengadaan belum optimal memahami proses pengadaan	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/lelahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	Risiko fraud / integritas	Inspektorat Wilayah	masih terdapat ASN APJP yang perlu ditingkatkan integritasnya	Internal dan Eksternal	UC	Penurunan Kredibilitas Ijen	Kemen kumham	Internalisasi AAJPI Nomor KEP-063/AAJPI/DIR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAJPI nomor S-01/AAJPI/3/2014 tanggal 6 Maret 2014	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/lelahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan
28	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/lelahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	Risiko fraud / integritas	Inspektorat Wilayah	Kurangnya integritas Auditor dalam melaksanakan tugas Terdapatnya conflict of interest/penyuapan pada saat perencanaan kegiatan audit Terdapatnya conflict of interest/penyuapan pada proses pelaksanaan kegiatan audit Adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari manipulasi laporan audit	Internal dan Eksternal	UC	Penurunan Kredibilitas Ijen Hasil audit yang tidak obyektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Kemen kumham	Internalisasi AAJPI Nomor KEP-063/AAJPI/DIR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAJPI nomor S-01/AAJPI/3/2014 tanggal 6 Maret 2014 Penyusunan PKPT berdasar faktor risiko Revisi RKA/KL oleh ITWIL I Audit investigasi dan inspektorat wilayah I Adanya layanan UPG (unit pengendalian gratifikasi) Adanya UPP (unit pemberantasan pungutan liar) Adanya Layanan WBS	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/lelahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan
29	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	terjadinya kasus penyuaipan/ pemberian gratifikasi ilegal/ benturan kepentingan/ penyalahgunaan wewenang/ penyalahtunaan aset oleh APIP, yang terbukti	Risiko fraud / integritas	Inspektorat Wilayah	Adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari manipulasi laporan audit	Internal dan Eksternal	UC	Penjatuhan Hukuman disiplin yang tidak objektif	Kemen kumham	Penerapan PP No. 53 Tahun 2010, Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010, Permenkumham No. 28 Tahun 2019, UU ASN No. 5 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 17 Tahun 2020, Perka BKN No. 3 Tahun 2020, SOP	terjadinya kasus penyuaipan/ pemberian gratifikasi ilegal/ benturan kepentingan/ penyalahgunaan wewenang/ penyalahgunaan aset oleh APIP, yang terbukti
30	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	Risiko fraud / integritas	Inspektorat Wilayah	Adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari manipulasi laporan audit	Internal dan Eksternal	UC	Hasil Audit yang tidak objektif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan	Kemen kumham	Internalisasi AAJPI Nomor KEP-063/AAJPI/DIR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAJPI nomor S-01/AAJPI/3/2014 tanggal 6 Maret 2014	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan
31	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, revisi, evaluasi, was lainnya)	Risiko fraud / integritas	Inspektorat Wilayah	Kurangnya integritas Auditor dalam melaksanakan tugas	Internal dan Eksternal	UC	Penurunan Kredibilitas Ijen	Kemen kumham	Internalisasi AAJPI Nomor KEP-063/AAJPI/DIR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAJPI nomor S-01/AAJPI/3/2014 tanggal 6 Maret 2014 serta Kode Etik APJP (Permenkumham 25 th 2022)	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, revisi, evaluasi, was lainnya)

**RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO**

**IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)**

PENETAPAN TUJUAN		RISIKO										Pihak yang Terkena		Sisa Risiko
		Permasalahan		Penyebab		Dampak		Pengaruh Intern yang Ada		Pihak yang Terkena		Sisa Risiko		
Risk Event Nu.		Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian						
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
32	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal, digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	Risiko Operasional	Sekretariat Ijen (Fungsi SIP)	Pengembangan sistem informasi belum mengakomodir kebutuhan penginputan data hasil pengawasan tidak dilakukan secara tepat waktu Belum dilakukan analisis terhadap hasil SIMWAS	Internal	C	Data hasil pengawasan tidak update bila digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan	Inspektoral Jenderal	Pengembangan SIMWAS komitmen bersama dalam penginputan hasil pengawasan pada aplikasi SIMWAS Dilakukan analisis atas hasil pengawasan	15	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan		
34	Kurangnya respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP terkait temuan pengembalian ke kas negara dan temuan administrasi	bertambahnya temuan hasil pengawasan APIP yang belum di tindaklanjuti	Risiko Keuangan dan Risiko Kepatuhan	Inspektoral Wilayah	-Adanya temuan APIP yang berulang yang sifatnya administrasi, sehingga sakter enggan menindaklanjuti -adanya pergantian Kepala Saker sehingga tidak mengetahui adanya temuan dimaksudkan adanya temuan berulang	Internal dan Eksternal	C dan UC	Temuan hasil pengawasan ijen terus bertambah, dimungkinkan WBK/WBBM	Kemen kumham	Rekonsiliasi tindaklanjuti temuan APIP secara berkala		bertambahnya temuan hasil pengawasan APIP yang belum di tindaklanjuti		
33	Kegiatan terlambat dipertanggung jawabkan	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	Risiko Operasional	Sas ITJEN (Fungsi Keuangan)	Pengajuan usulan anggaran berdekatan dengan pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Kinerja pengelolaan uang persediaan rendah	Inspektoral Jenderal	-Membuat surat edaran Sas ITJEN terkait batasan waktu usulan RAB dan KAK Pelaksanaan Kegiatan -Menunda pemberian uang kegiatan selanjut sebelum pertanggungjawaban yang terdahulu diselesaikan		Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan		
35	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM ITJEN	Pengembangan dan pola mutasi kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi Kepagawaian)	- Terbatasnya anggaran Diklat, khususnya untuk penyelenggaraan diklat eksternal di luar BPSDM.	Internal	C	Terhambat pembentukan kader (talent) organisasi	Kemen kumham	- Mengajukan usul diklat yang mampu menurunkan GAP Kompetensi ke BPSDM melalui Sejen - Menyusun anggaran untuk penyelenggaraan diklat mandiri - Menyelenggarakan PKS, Workshop, FGD untuk memenuhi pengembangan kompetensi selain Diklat - Melakukan analisis efektivitas pelatihan/ diklat yang sudah dilakukan		Pengembangan dan pola mutasi kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya		
					Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti diklat tidak hadir dan belum ada punishment	Internal		Pengembangan pegawai tidak sesuai dengan rencana diklat pegawai yang telah disusun	Inspektoral Jenderal	-Membuat rencana diklat/ pengembangan pegawai yang memuat diklat, peserta, dan jadwal pelaksanaan - Membuat usulan peraturan internal yang mengatur punishment bagi pegawai yang tidak bersedia mengikuti diklat, workshop, dll - Membuat rekap diklat pegawai (KPI Diklat)				
					Masih terdapat pegawai yang tidak mendapatkan diklat yang sesuai dengan GAP Kompetensinya	Internal		Pengembangan karir pegawai terhambat sehingga akan berdampak pada pembentukan talent-talent organisasi	Kemen kumham	- Analisis hasil uji kompetensi pegawai - Penentuan diklat berdasarkan kebutuhan GAP kompetensi pegawai - pegawai yang diberangkatkan untuk diklat sesuai dengan rencana pengembangan pegawai				
					Daftar Diklat dan kuota yang ditetapkan oleh Penyelenggara Diklat (internal/eksternal) terbatas untuk Ijen	Internal		Terdapat pegawai yang tidak mendapatkan diklat pada tahun tersebut	Kemen kumham	- Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Sejen dan BPSDM untuk penambahan kuota diklat				

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO (REGISTER RISIKO)											
Risk Event Nu.	Permasalahan	Risiko			Penyebab		Dampak		Penggendalian Intern yang Ada		Sisa Risiko
		Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITWIL	Terdapat banyaknya pengembalian uang perjalanan dinas LS lebih besar dari Rp.50.000.000,-	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Fungsi Keuangan)	Perhitungan pengajuan LS tidak tepat	Internal	C	-Rawan terjadi konflik dan benturan kepentingan -Dapat menghambat pengembangan karir Pegawai yang bersangkutan	Inspektoral Jenderal	-Rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar Jabatan Administrasi, Fungsional Umum (JU), dan Fungsional Terentu (JFT) -Mutasi Diagonal	Terdapat banyaknya pengembalian uang perjalanan dinas LS lebih besar dari Rp.50.000.000,-
37	Perbedaan data temuan	Data tindak lanjut temuan pengawasan APIP dan temuan eksternal tidak update	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi SIP)	Tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK belum dituntaskan dalam SIPTL	Eksternal	C	Masih ada temuan lama hasil pemeriksaan BPK. Tidak dapat menyajikan data perkembangan tindak lanjut secara realtime. Keterlambatan tindak lanjut. Pengelolaan data hasil pengawasan yang tidak update.	Inspektoral Jenderal	Surat edaran Irieh perihal penyelesaian tindak lanjut temuan BPK  Berkordinasi dengan BPK untuk mengintegrasikan SIMWAS dan SIPTL. Kelengkapan data pendukung tindak lanjut, komitmen bersama dalam penginputan temuan hasil pengawasan pada aplikasi simwas.	Data tindak lanjut temuan pengawasan APIP dan temuan eksternal tidak update
38	Inventarisasi BMN tidak update	Aset BMN hilang	Risiko Operasional	Ses Irieh (Bag Umum)	Inventarisasi aset EMN tidak dilaksanakan secara periodik. Pemindahan aset BMN antar ruangan tidak dilakukan sesuai prosedur. Aset BMN dibawa pegawai tidak sesuai dengan prosedur.	Internal	C	Jumlah dan keberadaan aset BMN tidak sama dengan yang tertera dalam data BMN	Inspektoral Jenderal	Inventarisasi aset EMN wajib di laksanakan secara periodik. Inventarisasi aset BMN tiap ruangan. Penomoran aset	Aset BMN hilang
39	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	Pengadaan telat dilaksanakan	Risiko Operasional	KPAdan ULP	ULP. Pejabat pengadaan dan PPK kurang respon	Internal	C	realisasi anggaran Ipengadaan tidak teresap sesuai Procurement plan	Inspektoral Jenderal	-Menyusun RUP -Lelang Pra DIPA	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan
40	Adanya benturan kepentingan dalam proses pemberian surat keterangan catatan cela	Pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihann hukuman disiplin pegawai	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Fungsi dan SIP)	Belum adanya SOP permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihann hukuman disiplin pegawai	Internal dan Eksternal	C/ UC	Menurunkan citra ITJEN	Kemen kumham	Reviu berjenjang oleh pimpinan	pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihann hukuman disiplin pegawai
41	IACMI/KAP level 4 belum tercapai	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar KAAP dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI)	Risiko Kepatuhan	Inspektoral Wilayah	- Sumber daya belum memadai - Administrasi tidak terib -data dukung elemen belum terpenuhi sesuai LKE - Ketidaktahuan terhadap mekanisme penilaian.	Internal	C	penurunan reputasi dan penurunan kinerja	Kemen kumham	Self assessment yang dilakukan oleh intern Irieh	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu KAAP dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI)
42	Perbedaan data temuan	Data Hukuman Disiplin tidak update	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi dan SIP)	Satker belum seluruhnya menyampaikan laporan data rekapitulasi hukuman disiplin pegawai	Eksternal	UC	Data belum terupdate pada database Irieh	Inspektoral Jenderal	Surat edaran terib administrasi laporan hukuman disiplin pegawai serta pengembangan Aplikasi Hukuman Disiplin dalam aplikasi SIMWAS VERSI 3.0	Data Hukuman Disiplin tidak update

**PENETAPAN TUJUAN**

Risk Event Nu.	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)										Sisa Risiko
		Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Penyebab		Dampak		Pihak yang Terkena		Pengendalian Intern yang Ada	
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
43	PKPT berbasis risiko belum diterapkan secara optimal sesuai Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR)	Satker yang bersiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT	Risiko Operasional	Inspektoral Wilayah	Manajemen risiko belum dilaksanakan secara menyeluruh seluruh satker	Internal	C	Nilai Maturitas IACM / KAPIP belum Optimal	Kemen kumham	- Pelatihan KAPIP - Pendampingan penyusunan IMR satker	15	
44	Prosedur pencegahan dan penanganan bencana belum dipahami oleh seluruh pegawai	Potensi terjadinya bencana/musibah (Kebakaran, Pencurian dll)	Risiko Operasional terkait bencana	ITJEN	-Pegawai tidak disiplin menjalankan protokol keselamatan kerja-Belum terdapat sosialisasi/simulasi terhadap bencana -Sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan bencana Belum dilakukan evaluasi berkala	Internal dan eksternal	C dan UC	-Kurang optimalnya kinerja ITJEN -Adanya korban jiwa -Kerusakan BMN -Kehilangan data penting	Inspektoral Jenderal	-adanya alat pemadam kebakaran -penugasan satpam selama 24 jam secara shift kerja	Potensi terjadinya bencana/musibah (Kebakaran, Pencurian dll)	
45	Perbedaan data temuan	menghilangkan data temuan intranet dan/atau	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Fungsi SIP)	Tidak update input data dalam SIMWAS maupun SIPTL	Internal dan eksternal	C dan UC	Data base pengawasan tidak update/ hilang	Kemen kumham	Rekon Internal ITJEN maupun dengan BPK/BPKP/ORI	menghilangkan data temuan intranet dan/atau	
46	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur	terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat (Bagian Umum)	Pengendalian terkait pengadaan barang/jasa ITJEN belum optimal	Internal	C	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan standar	Inspektoral Jenderal	Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan SOP	terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	
47	Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan	salah saji dalam laporan keuangan ijen	Risiko Pelaporan	Sekretariat ITJEN (Fungsi Keuangan dan Bag. Umum)	Keterbatasan kompetensi Tim Penyusun Laporan Keuangan Pengendalian internal belum optimal	Internal	C	Adanya temuan BPK	Inspektoral Jenderal	Mengikuti sertifikasi akuntansi pemerimtahan (CGAA dan CGAE) Diklat Bendahara Diklat PPK Diklat PPSPM	salah saji dalam laporan keuangan ijen	
48	Efektifitas kerjasama belum optimal	Salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Fungsi Humas)	Monitoring Evaluasi perjanjian kerja sama belum dilaksanakan	Internal dan Eksternal	C/ UC	Belum diketahui efektif tidaknya kerjasama yang telah dilaksanakan	Inspektoral Jenderal	Melaksanakan kerjasama dengan K/L/Instansi lainnya	Salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU	
49	Terjadinya benturan kepentingan dalam pemberian anggaran kegiatan	menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Fungsi Keuangan)	Pemberian layanan keuangan tidak sesuai SOP	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Inspektoral Jenderal	Menyusun rekapitulasi pengajuan anggaran harian	menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	
50	Belum memiliki grand design Teknologi Informasi Pengawasan	merubah/ menghilangkan data dalam server	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Fungsi SIP)	User ID dan Password tidak terbatas pada pegawai tertentu	Internal	C	Data base pengawasan tidak update/ hilang	Inspektoral Jenderal	-User ID dan pasword khusus untuk pegawai yang menengahi server -fakta integritas	merubah/ menghilangkan data dalam server	



RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO (REGISTER RISIKO)												
Risk Event Nu.	PENETAPAN TUJUAN	Permasalahan	Risiko				Penyebab			Dampak		Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Pengendalian Intern yang Ada	
1	5	Layanan SIPDU belum optimal	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51		Pengaduan tidak diproses sesuai SOP	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Fungsi Humas)	Adanya intervensi dari pihak internal/eksternal	Internal dan Eksternal	C/ UC	Pengaduan tidak di tindaklanjuti	Kemen kumham	Melakukan monitoring atas pengaduan yang diterima secara berkala	Pengaduan tidak diproses sesuai SOP	
52		Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	Risiko Operasional	Ses.lijen (Bag Umum)	Operator BMN belum menyusun PSP atas BMN yang ada	Internal	C	1. Administrasi pengelolaan BMN belum terbit 2. Alokasi anggaran pemeliharaan terbatas	Inspektoral Jenderal	1. Melakukan inventarisasi ulang seluruh BMN yang belum di PSP 2. Mempercepat proses PSP	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	
53		Salah saji yang material pada Laporan Keuangan Ijen	Risiko Keuangan	Ses ITJEN (Fungsi Keuangan)	Penyimpangan dalam pertanggungjawaban kegiatan	Internal	C	Penyajian laporan finansial (laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca) yang tidak sesuai metode akuntansi berbasis akrual	Inspektoral Jenderal	Melakukan penyusunan jurnal terkait setiap periode pelaporan IK (semester I, tw 3 dan semester II)	Posisi Keuangan tidak mencerminkan nilai sebenarnya pada akhir periode pelaporan	
54		Pelaksanaan RB ITJEN belum terdokumentasi dengan baik	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Kurangnya komitmen seluruh pegawai ITJEN dalam mengimplementasikan RB.	Internal	C	Implementasi pelaksanaan RB ITJEN tidak optimal menunjang implementasi pelaksanaan Rb kementerian	Inspektoral Jenderal	Workshop dan PKS PNIPRB. Pembentukan SK Tim RB ., pelaksanaan pengutusan RB melalui mekanisme rapat, pembentukan agen perubahan. Koordinasi pelaksanaan tugas Tim RB.	(tidak ada sisa risiko)	
55		Pendokumentasian Pelaksanaan implementasi SPP belum optimal di laksanakan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Kompetensi SDM penyusunan laporan penyelenggaraan SPP Kurang memadai 5 unsur pengendalian SPP yang wajib dituangkan dalam laporan.	Internal	C	Rekomendasi maturitas SPP belum di tindaklanjuti seluruhnya	Inspektoral Jenderal	Penyusunan Laporan SPP -mengikuti workshop SPP -menyusun SK Tim Penyelenggaraan SPP. Melakukan perbaikan penyelenggaraan maturitas SPP ITJEN sesuai dengan rekomendasi	(tidak ada sisa risiko)	
56		Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian indikator kinerja instansi dan individu	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Penyusunan LAKIN ITJEN belum mengikuti diklat penyusunan LAKIN.	Internal	C	Penyajian SAKIP dalam LAKIN ITJEN belum menggambarkan kinerja ITJEN	Inspektoral Jenderal	Mengikuti workshop evaluasi SAKIP. Menyusun indikator kinerja level eselon 1 sd level eselon IV dan JfA. Mengintensifikasikan koordinasi dengan Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian guna mempercepat penyelesaian laporan kinerja	(tidak ada sisa risiko)	
57		Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian indikator kinerja instansi dan individu	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Anggaran dalam RKAKL banyak dilakukan revisi anggaran (lebih dari lima kali revisi)	Internal	C	RKAKL kurang efektif efektif sehingga sering kali melakukan revisi DJPA/Anggaran pada tahun berjalan	Inspektoral Jenderal	Menyusun kebutuhan anggaran di Des TA berjalan untuk untuk TA. X+1 . Menyusun postur anggaran TA.X+1 untuk memudahkan dalam perencanaan kinerja. Mengkunci usulan kegiatan yang tertuang dalam RKAKL saat periode pagu anggaran	(tidak ada sisa risiko)	

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO (REGISTER RISIKO)													
Risk Event Nu.	Permasalahan	Risiko				Penyebab			Dampak		Pihak yang Terkena	Penggendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
		Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Uraian				
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
58	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian indikator kinerja instansi dan individu	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Program kerja yang telah tersusun dalam PKPT. dalam pelaksanaan kegiatannya masih berubah tidak sesuai dengan PKPT terutama kegiatan untuk pemenuhan target IKU dan IKK	Internal	C	Jadwal pelaksanaan program pengawasan tidak sesuai dengan Kalender Kerja dan Disbursement Plan yang telah ditetapkan, mengakibatkan Bagian Keuangan kesulitan dalam menyediakan penganggarnya	Inspektoral Jenderal	Mengintensifkan koordinasi dengan Inspektoral Wilayah dan Kepala Bagian di lingkungan ligan perihal pelaksanaan program kerja agar memperhatikan kegiatan yang telah tersusun dalam PKPT dan bila ada perubahan agar memperhatikan target yang telah ditentukan sebelumnya	(tidak ada sisa risiko)		
59	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian indikator kinerja instansi dan individu	Salah menetapkan Perjanjian Kinerja	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	RENUA disusun diawal tahun, tidak diupdate di periode pagu anggaran dan alokasi anggaran	Internal / Eksternal	C / UC	Salah menetapkan target dan besaran anggaran dalam Perjanjian Kinerja yang seharusnya data antara RENUA, RKA-KL dan Perjanjian Kinerja adalah sama, sehingga akan berdampak pada saat penyusunan evaluasi kinerja program maupun kegiatan	Inspektoral Jenderal	-Mengintensifkan koordinasi dengan Inspektoral Wilayah dan Kepala Bagian bahwa data yang tertuang dalam RENUA, dipedomani sebagai dasar penyusunan RKA-KL. -Mengupdate aplikasi RKAKL pada aplikasi satudja.kemenkeu.go.id -mengupdate data GPP gaji dari Bagian keuangan dalam aplikasi RKAKL pada setiap periode penyusunan pagu -mengupdate data pegawai dalam aplikasi RKAKL per golongan dan Bagian kepegawaian -mengupdate data RENUA dalam aplikasi KRISNA per periode penyusunan pagu	(tidak ada sisa risiko)		
60	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian indikator kinerja instansi dan individu	Indikator Kinerja kurang memenuhi kriteria SMART	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Indikator disusun belum berbasis outcome	Internal	C	Indikator Kinerja tidak bisa dihitung capaian targetnya	Inspektoral Jenderal	Berkordinasi dengan DJA KEMENKEU, BAPPENAS, MEMPAN dan APJP terkait penyusunan Indikator Kinerja berbasis SMART	(tidak ada sisa risiko)		
61	Layanan kepegawaian belum optimal	Pemberian layanan kepegawaian terkait kehadiran pegawai, kenaikan pangkat gaji berkala, update data simpeg, cuti, disiplin pegawai dan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (kepegawaian)	Pengusulan kenaikan pangkat/jabatan terlambat	Internal / Eksternal	C / UC	-Ketidaksiapan pegawai atas layanan kepegawaian (pangkat, jabatan, PAK, diklat) dan karir pegawai menjadi terhambat - Ketidaksiapan pegawai atas layanan kepegawaian (pangkat, jabatan, PAK, diklat) dan berkurangnya hak-hak finansial pegawai -Koordinasi intensif dengan Biro Kepegawaian dan KN	Inspektoral Jenderal	Menyusun daftar nominatif kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, gaji berkala di awal tahun anggaran  Melakukan konsyering perihal kenaikan pangkat dan jabatan ke biro kepegawaian sekejen	(tidak ada sisa risiko)		
62	Tata nilai, Kemenkumham belum optimal ditanyakan pada setiap ASN	Tidak tercapainya target pengisian LHKASN	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi Kepegawaian)	Tidak updatenya data pegawai Wajib Laporan LHKASN	Internal	C	Tidak tercapainya pengisian LHKASN di lingkungan Kemenkumham	Kemen kumham	Sosialisasi mengenai LHKASN dan aplikasi pengisian LHKASN serta melakukan pendalaman terkait LHKASN kepada Admin LHKASN masing-masing satuan kerja	(tidak ada sisa risiko)		

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO (REGISTER RISIKO)											
IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)											
Risk Event Nu.	Permasalahan	Risiko			Penyebab		Dampak		Pihak yang Terkena		Sisa Risiko
		Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	Tata nilai, Kemenkumham belum optimal ditanyakan pada setiap ASN	Pegawai ITJEN terlambat melaporkan LHKPN	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi Kepegawaian)	-Adanya penambahan fitur tata cara penginputan aplikasi -Kurangya respon pegawai yang wajib lapor LHKPN	Internal / Eksternal	C / UC	Keterlambatan pengisian LHKPN di Lingkungan Ijen	Kemenkumham	- PKS lata cara pengisian LHKPN - Sosialisasi	(tidak ada sisa risiko)
64	Tata nilai, Kemenkumham belum optimal ditanyakan pada setiap ASN	Bertambahnya Pelanggaran kode etik maupun sanksi hukids yang dilakukan oleh pegawai ITJEN	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Fungsi Kepegawaian)	Belum ada mekanisme internalisasi tata nilai Kemenkumham. Tidak ada evaluasi terhadap para agen perubahan / pegawai yang telah mengikuti TOT Tunas Integritas	Internal	C	Pelanggaran meningkat. Indeks Integritas menurun. Kepercayaan terhadap ITJEN menurun. Tidak ada role model / agen perubahan yang dapat memberikan nilai tambah untuk peningkatan kinerja ITJEN	Inspektoral Jenderal	-Workshop budaya kerja -arahannya pimpinan. -Menetapkan agen perubahan. -Diklat Sertifikasi " Role Model / Agen Perubahan" dengan KPK dan lembaga pengembangan integritas - PKS integritas/ revolusi mental	(tidak ada sisa risiko)
65	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi SIP)	Formasi SDM ITJEN yang memiliki latar belakang Teknologi Informasi belum terpenuhi	Eksternal	C	Kemajuan TI-ITJEN tertinggal dibandingkan dengan TI unit eselon I lainnya. Keterbatasan pengetahuan tentang teknologi informasi terutama terkait pelaksanaan audit	Inspektoral Jenderal	- Menetapkan Tim Pengelabla Teknologi Informasi - Penyusunan Roadmap TI Ijen. - Diklat e-audit - Diklat TI - Penyusunan Pedoman Audit TIK - Penyusunan Roadmap Ijen	(tidak ada sisa risiko)
66	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi SIP)	Belum adanya perencanaan / grand design terkait Pengembangan teknologi Informasi	Internal	C	Informasi terkait hasil pengawasan belum optimal	Inspektoral Jenderal	Integrasi SIMWAS dan e-office	(tidak ada sisa risiko)
67	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi SIP)	Koneksi jaringan internet terputus Terputusnya Jaringan Kelistrikan	Internal	C	Penggunaan bandwidth tidak tepat guna Downtime pada Server	Inspektoral Jenderal	Penerapan bandwidth manager, firewall dan anti spyware Penggunaan UPS	(tidak ada sisa risiko)
68	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi SIP)	Internet Service Provider down	Eksternal	UC	Koneksi internet terputus	Inspektoral Jenderal	Memakai lebih dari satu provider	(tidak ada sisa risiko)
69	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi SIP)	Terkena spyware dan banyak terinstall add on	Internal	C	Performa PC dan laptop rendah	Inspektoral Jenderal	Penggunaan firewall dan antivirus	(tidak ada sisa risiko)
70	Belum memiliki grand design Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Informasi Sarana pengaduan belum optimal membantu masyarakat terkait pelaporan pengaduan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi Humas)	belum optimalnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat (layanan pengguna)	Eksternal	UC	Masyarakat tidak dapat menggunakan layanan pegaduan secara optimal	Kemenkumham	Penyebaran informasi layanan pengaduan kepada masyarakat, adanya jaminan kerahasiaan pelapor. Dan membangun SIPIDU dan E VWAS (sistem informasi pengaduan integrasi dan terpadu)	(tidak ada sisa risiko)

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO											
IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)											
Risk Event Nu.	Permasalahan	Risiko			Penyebab		Dampak		Pihak yang Terkena	Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
		Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian			
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	Keterlambatan pemrosesan surat masuk melalui SISUMAKER	Informasi materi surat terlambat diterima pimpinan	Risiko Operasional	Ses. Ijtien (Bag. Umum)	Sisumaker sering down	Eksternal	UC	Pimpinan tidak dapat mendisposisikan secara tepat waktu	Inspektoral Jenderal	Berkoordinasi dengan PUSDATIN KEMENKUMHAM	(tidak ada sisa risiko)
72	Kurangnya informasi tentang data arsip aktif dan in aktif	Informasi materi surat terlambat dikirim ke unit terkait	Risiko Operasional	Ses. Ijtien (Bag. Umum)	Rendahnya respon dan penerima pesan	Internal	C	Informasi terlambat diterima oleh unit terkait	Inspektoral Jenderal	adanya SOP SISUMAKER	(tidak ada sisa risiko)
73	Kurangnya informasi tentang data arsip aktif dan in aktif	Arsip hasil pengawasan dan administrasi rusak/ hilang	Risiko Operasional	Ses. Ijtien (Bag. Umum)	Kurang SDM JFT Arsiparis Retensi arsip tidak berkala	Internal	C	Penumpukan arsip	Inspektoral Jenderal	SOP Pengarsipan (jadwal retensi arsip) Penambahan JFT Arsiparis	(tidak ada sisa risiko)
74	Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal	Pemenuhan sarana prasarana pengawasan yang belum optimal	Risiko Operasional	Ses. Ijtien (Bag. Umum)	Belum memiliki rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan, jangka panjang 5 sd 10 tahun ke depan	Eksternal	UC	APIP dalam melakukan pengawasan belum bekerja secara maksimal	Inspektoral Jenderal	Sudah menyusun RKBMN	(tidak ada sisa risiko)
75	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	Kebakaran Gedung	Risiko Operasional	Ses. Ijtien (Bag. Umum)	Konsleting listrik, merokok tidak pada tempatnya	Internal	C	Kerugian materiil dan immaterial	Inspektoral Jenderal	Membuat aturan dilarang merokok di dalam gedung terkecuali di ruangan yang telah ditentukan dan ada ventilasi udaranya. Simulasi kebakaran untuk semua pegawai	(tidak ada sisa risiko)
76	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITWIL	salah saji dalam laporan keuangan ijtien	Risiko Pelaporan	Sekretariat ITJEN (Fungsi Keuangan dan Umum)	Update Aplikasi SAIBA yang tidak sinkron dengan update Aplikasi SIMAK BMN	Eksternal	UC	Munculnya perbedaan data antara data SAIBA dengan data SIMAK BMN	kemenkumham	- Berkoordinasi dengan KPPN dan KPKNL - Berkoordinasi dengan Biro Keuangan - Rekonsiliasi data Laporan Keuangan	(tidak ada sisa risiko)
77	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITWIL	Data realisasi anggaran tidak mencerminkan kondisi realisasi yang sebenarnya	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi Keuangan)	Keterlambatan dalam menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dan pencatatan pertanggungjawaban. Dokumen realisasi belanja dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tidak memenuhi kriteria lengkap dan benar	Internal	C	Realisasi anggaran tidak maksimal. Perbedaan data realisasi di SPAN dengan data realisasi di user (Itwil dan Sekretariat) Penggunaan anggaran negara tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dapat diyakinkan	Inspektoral Jenderal	Bagian keuangan dan Bendahara Pengeluaran melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan supaya segera melengkapi bukti pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar setelah kegiatan selesai dilaksanakan	(tidak ada sisa risiko)
78	Salah saji yang material pada Laporan Keuangan Ijtien yang tidak diselesaikan	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang tidak diselesaikan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Fungsi Keuangan)	Penolakan untuk bertanggung jawab yang dilakukan oleh Bendahara. Pegawai bukan bendahara dan pihak ketiga.	Internal Eksternal	C / UC	1. Menimbulkan piutang tak tertagih 2. Menurunkan beban serta mengurangi nilai kekayaan inspektoral jenderal	Kemenkumham	Permenkumham Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	(tidak ada sisa risiko)
79	Data SAIBA dan BMN tidak sinkron	Perbedaan antara data SAIBA dan data SIMAK BMN	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi Keuangan)	Adanya perbedaan pemahaman dan ketidak telitian antara operator SAIBA dan SIMAK BMN sehingga terjadi kesalahan dalam penginputan ke dalam aplikasi	Internal	C	Penyusunan Laporan Keuangan menjadi terhambat	Kemenkumham	- Melakukan koordinasi antara Bagian Keuangan dengan Bagian Umum - Melaksanakan Rekonsiliasi miental antara operator SAIBA dengan operator SIMAK BMN	(tidak ada sisa risiko)

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO (REGISTER RISIKO)												
IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)												
Risk Event Nu.	Permasalahan	Risiko			Penyebab		Dampak			Pihak yang Terkena	Penggendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
		Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Uraian			
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80	Pembayaran tagihan pihak ketiga/penyedia belum tepat waktu	Pembayaran tagihan dan pihak ketiga/penyedia yang terlambat/belum diselesaikan	Risiko Keuangan	Sekretariat ITJEN (Fungsi Keuangan)	Pihak ketiga/penyedia terlambat dalam menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pengeluaran	Eksternal	U/C	1. Pembayaran tagihan menjadi terlambat 2. Menimbulkan piutang pihak ketiga yang harus diokasikan pada anggaran tahun berikutnya	Inspektoral Jenderal	Berkordinasi dengan pihak ketiga/penyedia supaya penyampaian tagihan dapat dilakukan segera sesuai jadwal yang telah disepakati dengan didukung dengan data yang lengkap	(tidak ada sisa risiko)	
81	Masih terdapat Bendahara belum memiliki kompetensi yang memadai	Bendahara dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan belum ditunjang dengan kompetensi yang memadai	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi Keuangan)	Terdapat Bendahara yang belum mengikuti Diklat Perbendaharaan	Internal	U/C	Laporan Pertanggungjawaban (LP) kurang akurat/mabel	Inspektoral Jenderal	Mengusulkan Bendahara yang belum memiliki Sertifikasi untuk segera dikusertakan Diklat Perbendaharaan atau mengikuti Bimtek tentang Perbendaharaan	(tidak ada sisa risiko)	
82	Masih terdapat dokumen pertanggung jawaban yang menggunakan anggaran yang tidak didukung dengan bukti lengkap dan benar	Realisasi anggaran belum mencerminkan kinerja yang dihasilkan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi Keuangan)	Pelaksana kegiatan tidak segera melengkapi bukti pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar	Internal	C	Penggunaan anggaran negara tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dapat diyakinkan kebenarannya	Inspektoral Jenderal	Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi seluruh dokumen penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan benar	(tidak ada sisa risiko)	
83	Masih terdapat dokumen pertanggung jawaban yang menggunakan anggaran yang tidak didukung dengan bukti lengkap dan benar	Pagu/Minus dalam pengelolaan anggaran	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi Keuangan)	Kesalahan pembebanan, penambahan belanja pegawai Pembayaran kegiatan tidak sesuai dengan bukti Salah pembukuan pertanggungjawaban oleh bendahara	Internal	C	Terdapat pagu yang minus antar kegiatan/ komponen/ sub komponen	Inspektoral Jenderal	- Pengujian RAB pada saat penyusunan RKA-KL maupun pada saat usulan Revisi wajib memperhatikan PMK tentang Bagian Akun Standar dan Realisasi SPAN - Revisi sebelum batas waktu revisi ditutup	(tidak ada sisa risiko)	
84	UP (uang persediaan) tidak cukup tersedia sesuai dengan kebutuhan dalam RAB dan KAK pelaksanaan kegiatan	anggaran perjalanan dinas belum dapat dibayarkan tepat waktu	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Fungsi Keuangan)	kesalahan MAK dalam pengajuan perjalain Kesalahan Pengajuan RAB Verifikasi tidak dilakukan secara teliti Hilangnya berkas pertanggungjawaban Perjalain Dinas Tidak terlibat dalam pengarsipan berkas perjalanan dinas	Internal	C	ketertambatan pembayaran kegiatan perjalanan dinas Kesalahan jumlah anggaran yang dibayarkan Perjalain Dinas tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan cepat sesuai waktu yang ditetapkan	Inspektoral Jenderal	-sudah adanya SOP pengajuan perjalain -verifikasi RAB oleh Kasub Perjalain -Membayarkan anggaran kegiatan sebesar 80% dari Pagu yang diajukan -merevisi kembali KAK dan RAB pelaksanaan yang diajukan oleh ITWILU Bagian	(tidak ada sisa risiko)	
85	Perbedaan data temuan	Gaji yang diterima pegawai lebih/ kurang	Risiko keuangan	Sekretariat ITJEN (Fungsi Keuangan)	Salah input data pada aplikasi GPP Update data pegawai pada aplikasi GPP bermasalah Terlambatnya pengajuan gaji pegawai ke KPPN	Internal	C	Pengembalian/ pembayaran gaji oleh/ kepada pegawai. Terlambatnya pembayaran gaji	Inspektoral Jenderal	Verifikasi ulang data pegawai Mengupdate aplikasi GPP	(tidak ada sisa risiko)	
86	Kurang optimalnya peran POKJA Tim RB, SAKIP dan SPIP ITJEN yang telah ditetapkan	penyuaan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP - untuk menilai nilai ITJEN dan penyuaan oleh POKJA kepada Kasub KRB	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Data dukung RB, SAKIP dan SPIP disampaikan oleh masing-masing pokja tidak lengkap	Internal dan eksternal	C dan UC	Nilar RB, SAKIP dan ITJEN buruk	Inspektoral Jenderal	Koordinasi POKJA Tim RB, SAKIP dan SPIP ITJEN untuk menyampaikan laporan per triwulan secara tepat waktu	(tidak ada sisa risiko)	

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO											
IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)											
Risk Event Nu.	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak			
		Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	Pagu belanja non operasional untuk pelaksanaan tuisi belum optimal	menerima suap dari ITWIL / sekretariat yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Belum ada rumusan / formulasi baku tentang pembagian pagu belanja non operasional di ITJEN	Internal	C	pembagian pagu non operasional per ITWIL/Bagian secara tidak obyektif	Inspektoral Jenderal	Mengevaluasi dan capaian output, capaian indikator kinerja kegiatan dan realisasi anggaran 2 minimal tahun sebelumnya	(tidak ada sisa risiko)
88	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap dari saliter pada saat penyusunan PKPT	Risiko fraud / integritas	Inspektoral Wilayah	masih terdapat APJP yang integritasnya kurang Pengawasan Berjenjang belum optimal Kurangnya Pemahaman Saliter Terhadap Kebijakan Anti Suap di Inspektoral Jenderal	Internal	C	Penurunan Kredibilitas Ijen	Kemen kumham	Penandalangan Pakta Integritas, Adanya SOP penyusunan Program Audit Sosialisasi Penanganan Gratifikasi dan Pungutan Liar	(tidak ada sisa risiko)



## PENILAIAN RISIKO (*RISK ASSESSMENT*)

1. Melakukan Identifikasi Risiko dengan menetapkan Potensi Risiko, Kriteria, Pemilik, Penyebab, Sumber, Dampak, Pihak Yang Terkena Dampak, Pengendalian Intern Yang Ada, Sisa Risiko). Proses Identifikasi menghasilkan **Register Risiko**.
2. Melakukan Analisis Risiko dengan mengukur level Kemungkinan Terjadi dan Dampak bila Terjadi, Tingkat Risiko dan Profil Risiko. Proses ini menghasilkan **Peta Risiko**.
3. Melakukan Evaluasi Risiko dengan menetapkan Prioritas, Toleransi, indikator risiko serta batas aman dari indikator risiko.  
Proses ini menghasilkan Prioritas, Indikator dan batas aman risiko

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO															
PENETAPAN TUJUAN			IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)						ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)				EVALUASI RISIKO		
Risk Event Nu.	Permasalahan	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman		
			Uraian	Nilai	Uraian	Nilai					Indikator Risiko Utama (IRU)				
1	5	15	17	18	19	20	21= 18 X 20	22	23	24	25	26			
22	Terjadinya fraud ataupun Operasi Tangkap tangan	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan/atau kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	Pasti	5	Kementerian	5	25	Merah / Sangat Tinggi	1	20	Jumlah kejadian OTT pegawai Kementumham	0			
23	Belum seluruh satuan kerja menyusun Manajemen Risiko	Rendahnya tingkat penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja	Pasti	5	Kementerian	5	25	Merah / Sangat Tinggi	2	20	Persentase satuan kerja yang belum dilakukan evaluasi manajemen risiko	82%			
2	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif	Adanya Berita Viral negatif di kementumham	Hampir Pasti	4	kementumham	5	20	Orange / Tinggi	3	15	Berita viral negatif di kementumham	1			
3	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan program)	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange / Tinggi	4	15	Jumlah kejadian kasus Fraud terkait adanya perdagangan pengaruh dalam penentuan program, yang terbukti	0			
4	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan pengadaan barang jasa)	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange / Tinggi	5	15	Jumlah kejadian kasus Fraud terkait adanya perdagangan pengaruh dalam penentuan pengadaan barang jasa yang terbukti	0			
5	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan pemberian rekomendasi)	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange / Tinggi	6	15	Jumlah kejadian kasus Fraud terkait adanya perdagangan pengaruh dalam penentuan pemberian rekomendasi, yang terbukti	0			
6	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan kebijakan)	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange / Tinggi	7	15	Jumlah kejadian kasus Fraud terkait adanya perdagangan pengaruh dalam penentuan kebijakan, yang terbukti	0			



RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO													
PENETAPAN TUJUAN		ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)										EVALUASI RISIKO	
Risk Event Nu.	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
		Sisa Risiko	15	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai					Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman
1	5	15	17	18	19	20	21= 18 X 20	22	23	24	25	26	
7	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan barang dan jasa (dalam pengelolaan SDM)	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange / Tinggi	8	15	Jumlah kejadian kasus Fraud terkait adanya perdagangan pengaruh dalam penentuan pengelolaan SDM, yang terbukti	0	
8	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (vendor memberikan sesuatu kepada pihak terkait)	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange / Tinggi	9	15	Jumlah kejadian Fraud (vendor memberikan sesuatu kepada pihak terkait, yang terbukti	0	
9	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemilihan barjas diatur)	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange / Tinggi	10	15	Jumlah kejadian Fraud terkait pemilihan barjas diatur), yang terbukti	0	
10	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (kualitas barang tidak sesuai)	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange / Tinggi	11	15	Jumlah kejadian Fraud terkait vendor memberikan sesuatu kualitas barang tidak sesuai, yang terbukti	0	
11	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemenang tender punya hubungan kekerabatan)	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange / Tinggi	12	15	Jumlah kejadian Fraud terkait hubungan kekerabatan dengan vendor., yang terbukti	0	
12	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa barang tidak bermanfaat)	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange / Tinggi	13	15	Jumlah kejadian Fraud pengadaan barang jasa yang tidak bermanfaat, yang terbukti	0	

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO																
PENETAPAN TUJUAN			IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)					ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)					EVALUASI RISIKO			
Risk Event Nu.	Permasalahan	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman			
			Uraian	Nilai	Uraian	Nilai					Indikator Risiko Utama (IRU)					
1	5	15	17	18	19	20	21= 18 X 20	22	23	24	25	26				
13	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa barang tidak bermanfaat)	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange / Tinggi	14	15	Jumlah kejadian Fraud terkait penyalahgunaan anggaran barjas, yang terbukti	0				
14	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan anggaran	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange / Tinggi	15	15	Jumlah kejadian fraud dalam pengelolaan anggaran yang terbukti	0				
15	Masih terdapat cattaan dalam Opini WTP yang diberikan BPK atas Laporan keuangan kementerian	Kurang teridentifikasi risiko terkait pengelolaan keuangan, barang jasa dalam kegiatan pendampingan LK, Reviu LK, Reviu RKAKL, Reviu BMN, Audit Barang Jasa oleh APIP	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange / Tinggi	16	15	Jumlah jenis temuan berulang dari tahun sebelumnya dalam LHP BPK	5				
1	Masih terdapat cattaan dalam Opini WTP yang diberikan BPK atas Laporan keuangan kementerian	opini atas laporan keuangan kementerian tidak WTP	Moderat	4		5	20	Orange / Tinggi	17	10	temuan material lebih dari batas aman (5%)	5%				
16	Pemenuhan data dukung belum memadai dan tidak memenuhi kriteria nilai minimal dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBMM	Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBMM tidak sesuai dengan Target yang ditetapkan	moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning	18	12	Persentase satker yang tidak lolos WBK/WBMM dari total satker yang diajukan ke TPN	10%				
24	Manajemen Risiko IT JEN hanya sebagai dokumen	Manajemen Risiko IT JEN belum menjadi data early warning system	moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning	19	15	Persentase realisasi kegiatan pengendalian risiko IRU yang tidak dilaksanakan /IRU yang belum tercapai	10%				

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO												
PENETAPAN TUJUAN		IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)				ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)						EVALUASI RISIKO
Risk Event Nu.	Permasalahan	15	Kemungkinan		Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman
			Uraian	Nilai						Uraian	Nilai	
1	5	17	18	19	20	21=18 X 20	22	23	24	25	26	
25	Hasil survei Persepsi Integritas dari KPK belum mencerminkan tingkat integritas Kemenkumham	menurunnya Integritas pelaksanaan tugas	moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning	10	Jumlah kejadian fraud dalam integritas pelaksanaan tugas yang terbukti	0	
26	Satker kurang respon dalam percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning	10	Presentase temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	40%	
27	Panitia / Pokja pengadaaan belum optimal memahami proses pengadaaan	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telelahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/ sedang	10	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telelahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	0	
28	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telelahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/ sedang	10	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telelahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	0	
31	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, was lainnya)	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/ sedang	10	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima penyusunan yang terbukti pada Pelaksanaan Audit	0	
32	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning	10	data Simwas dan dashboard pimpinan terupdate berkala tiap bulan	12	

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO												
PENETAPAN TUJUAN		ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)										EVALUASI RISIKO
Risk Event Nu.	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		Kemungkinan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
		Sisa Risiko	Uraian		Nilai	Uraian					Nilai	Indikator Risiko Utama (IRU)
1	5	15	17	18	19	20	21= 18 X 20	22	23	24	25	26
29	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	terjadinya kasus penyuaipan/pemberian gratifikasi ilegal/benturan kepentingan/penyalahgunaan wewenang/penyalahgunaan aset oleh APIP, yang terbukti	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/ sedang	26	10	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan .	0
30	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/ sedang	27	10	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	0
20	Data dukung ISO SMAP belum terdokumentasi dengan baik	Risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut	moderat	3	ITJEN	4	12	Kuning/ sedang	28	9	Persentase peningkatan kejadian kasus pungli/gratifikasi/korupsi yang terungkap dibandingkan tahun sebelumnya	0
17	Pemenuhan data dukung belum memadai dan tidak memenuhi kriteria nilai minimal dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/ sedang	29	10	Persentase peningkatan kejadian kasus pungli/gratifikasi/korupsi yang terungkap dibandingkan tahun sebelumnya	0
34	Kurangnya respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pengembalian ke kas negara dan temuan administrasi	bertambahnya temuan hasil pengawasan APIP yang belum di tindaklanjuti	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/ sedang	30	10	Presentase temuan pengawasan APIP yang belum ditindaklanjuti	15%

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO															
PENETAPAN TUJUAN			IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)						ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)				EVALUASI RISIKO		
Risk Event Nu.	Permasalahan	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman		
			Uraian	Nilai	Uraian	Nilai					Indikator Risiko Utama (IRU)				
1	5	15	17	18	19	20	21= 18 X 20	22	23	24	25	26			
33	kegiatan terlambat dipertanggung jawabkan	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning	31	10	Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA Itjen	2%			
35	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM IT JEN	Pengembangan dan pola mutasi kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/ sedang	32	10	Persentase diklat tidak yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan	50%			
36	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITWIL	Terdapat banyaknya pengembalian uang perjalanan dinas LS lebih besar dari Rp.50.000.000,-	moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning	33	10	Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA Itjen	2%			
37	Perbedaan data temuan	Data tindak lanjut temuan pengawasan APIP dan temuan eksternal tidak update	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/ Sedang	34	10	Persentase temuan pengawasan APIP yang belum diinput dalam Simwas oleh auditor	20%			
18	Pemenuhan data dukung SAKIP belum memadai / Satker belum optimal	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "A"	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/ sedang	35	10	Persentase rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	50,0%			
	menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP														

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO														
PENETAPAN TUJUAN			IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)						ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)				EVALUASI RISIKO	
Risk Event Nu.	Permasalahan	5	15	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		
				Uraian	Nilai	Uraian	Nilai					Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman	
1			17	18	19	20	21= 18 X 20	22	23	24	25	26		
40	Adanya benturan kepentingan dalam proses pemberian surat keterangan catatan cela		Moderat	3	ITJEN	4	12	Kuning/ sedang	36	8	jumlah kasus pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	0		
38	Inventarisasi BMN tidak update		Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/ sedang	37	10	Persentase aset BMN yang hilang	0		
39	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan		Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/ sedang	38	10	Minimal nilai belanja modal yang belum/terlambat direalisasikan	10% dari total BM		
41	IACM/KAPIP level 4 belum tercapai		Moderat	3	ITJEN	4	12	Kuning/ sedang	39	8	Penyusunan PKPT berbasis risiko	1		
21	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif		Moderat	3	ITJEN	4	12	Kuning/ Sedang	40	8	Jumlah kejadian LHA terbit tidak menginformasikan kondisi di lapangan / kondisi yang sebenarnya	2		
42	Perbedaan data temuan		Moderat	3	ITJEN	4	12	Kuning/ Sedang	41	8	Persentase kesalahan rekap data hukuman disiplin untuk bahan pimpinan, yang tidak update	0%		

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO															
PENETAPAN TUJUAN			IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)				ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)						EVALUASI RISIKO		
Risk Event Nu.	Permasalahan	5	15	Kemungkinan		Dampak	Tingkat Risiko		Profil Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman	
				Uraian	Nilai		Uraian	Nilai				Indikator Risiko Utama (IRU)			
1			17	18	19	20	21=18 X 20	22	23	24	25	26			
43	PKPT berbasis risiko belum diterapkan secara optimal sesuai Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR)		moderat	3	Inspektoral Jenderal	4	12	Kuning/ sedang	42	8		Persentase satker yang beresiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT	5%		
19	Pelaksanaan RB ITJEN belum terdokumentasi dengan baik		Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/ sedang	43	10		Persentase RKT RB satker yang belum terpenuhi s.d Desember tahun berjalan	15%		
44	Prosedur pencegahan dan penanganan bencana belum dipahami oleh seluruh pegawai		Moderat	3	ITJEN	4	12	Kuning / Sedang	44	4		jumlah kejadian bencana/musibah di kantor	0		
45	Perbedaan data temuan		Kecil	2	Kementerian	5	10	Biru/ rendah	45	5		Jumlah kejadian menghilangkan data temuan internal dan/atau eksternal	0		
46	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur		Kecil	2	ITJEN	4	8	Biru / Rendah	46	6		Jumlah kasus menerima suap dalam pengadaan untuk menguntungkan salah satu peserta pengadaan	0		
47	Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan		Kecil	2	Kementerian	5	10	Biru/ Rendah	47	5		jumlah kejadian salah salah saji dalam LK Ijten	0		
48	Efektifitas kerjasama belum optimal		Kecil	2	ITJEN	4	8	Biru /Rendah	48	4		jumlah kejadian Mitra kerja yang melanggar MOU / PKS	0		
49	Terjadinya benturan kepentingan dalam pemberian		Kecil	2	Kementerian	5	10	Biru/ Rendah	49	5		Jumlah kejadian Pemberian layanan keuangan tidak sesuai SOP	1		
50	Belum memiliki grand design Teknologi Informasi Pengawasan		Kecil	2	Kementerian	5	10	Biru/ Rendah	50	5		Jumlah kejadian terbukti merubah/ menghilangkan data dalam server	0		

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO																
PENETAPAN TUJUAN			IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)					ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)					EVALUASI RISIKO			
Risk Event Nu.	Permasalahan	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman			
			Uraian	Nilai	Uraian	Nilai					Indikator Risiko Utama (IRU)					
1	5	15	17	18	19	20	21= 18 X 20	22	23	24	25	26				
51	Layanan SIPIDU belum optimal	Pengaduan tidak diproses sesuai SOP	Kecil	2	Kementerian	5	10	Biru/ Rendah	51	5	Jumlah pengaduan yang tidak diproses	0				
52	Manajemen aset yang belum optimal	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	Kecil	2	ITJEN	4	8	Biru/ Rendah	52	4	persentase aset BMN yang belum dilakukan penetapan status	5%				
53	Salah saji yang material pada Laporan Keuangan Ijfen	Posisi Keuangan tidak mencerminkan nilai sebenarnya pada akhir periode pelaporan	Kecil	2	ITJEN	4	8	Biru/ Rendah	53		Jumlah kesalahan perhitungan dan pembebanan akun pada jurnal penyesuaian	0				
54	Pelaksanaan RB ITJEN belum terdokumentasi dengan baik	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)										(tidak ada sisa risiko)			
55	Pendokumentasian Pelaksanaan implementasi SPJP belum optimal di laksanakan	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)										(tidak ada sisa risiko)			
56	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian indikator kinerja instansi dan individu.	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)										(tidak ada sisa risiko)			
57	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian indikator kinerja instansi dan individu	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)										(tidak ada sisa risiko)			
58	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian indikator kinerja instansi dan individu	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)										(tidak ada sisa risiko)			



RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO															
PENETAPAN TUJUAN			IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)				ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)						EVALUASI RISIKO		
Risk Event Nu.	Permasalahan	Sisa Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman				
			Uraian	Uraian	Nilai				Indikator Risiko Utama (IRU)						
1	5	15	17	18	19	20	21= 18 X 20	22	23	24	25	26			
59	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian indikator kinerja instansi dan individu	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)		
60	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian indikator kinerja instansi dan individu	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)		
61	Layanan kepegawaian belum optimal	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)		
62	Tata nilai Kemenkumham belum optimal ditanamkan pada setiap ASN	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)		
63	Tata nilai Kemenkumham belum optimal ditanamkan pada setiap ASN	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)		
64	Tata nilai Kemenkumham belum optimal ditanamkan pada setiap ASN	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)		
65	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)		

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO													
PENETAPAN TUJUAN		IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)				ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)						EVALUASI RISIKO	
Risk Event Nu.	Permasalahan	Sisa Risiko		Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai					Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman
1	5	15	17	18	19	20	21= 18 X 20	22	23	24	25	26	(tidak ada sisa risiko)
66	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)
67	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)
68	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)
69	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)
70	Belum memiliki grand design Teknologi Informasi Pengawasan	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)
71	Keterlambatan pemrosesan surat masuk melalui SISUMAKER	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)
72	Kurangnya informasi tentang data arsip aktif dan in aktif	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)
73	Kurangnya informasi tentang data arsip aktif dan in aktif	(tidak ada sisa risiko)					(tidak ada sisa risiko)						(tidak ada sisa risiko)

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO														
PENETAPAN TUJUAN		IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)				ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)						EVALUASI RISIKO		
Risk Event Nu.	Permasalahan	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman	
			Uraian	Nilai	Uraian	Nilai					Indikator Risiko Utama (IRU)			
1	5	15	17	18	19	20	21= 18 X 20	22	23	24	25	26		
74	Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)										(tidak ada sisa risiko)	
75	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)										(tidak ada sisa risiko)	
76	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITWIL	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)										(tidak ada sisa risiko)	
77	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITWIL	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)										(tidak ada sisa risiko)	
78	Salah saji yang material pada Laporan Keuangan Ijfen	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)										(tidak ada sisa risiko)	
79	Data SAIBA dan BMN tidak sinkron	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)										(tidak ada sisa risiko)	

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO												
PENETAPAN TUJUAN		IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)						EVALUASI RISIKO		
Risk Event Nu.	Permasalahan	Sisa Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman	
			Uraian	Uraian	Nilai				Indikator Risiko Utama (IRU)			
1	5	15	17	18	19	20	21= 18 X 20	22	23	24	25	26
80	Pembayaran tagihan pihak ketiga/penyedia belum tepat waktu	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)
81	Masih terdapat Bendahara belum memiliki kompetensi yang memadai	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)
82	Masih terdapat dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)
83	Masih terdapat dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)
84	UP (uang persediaan) tidak cukup tersedia sesuai dengan kebutuhan dalam RAB dan KAK pelaksanaan	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)
85	Perbedaan data temuan	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)
86	Kurang optimalnya peran POKJA Tim RB, SAKIP dan SPIP ITJEN yang telah ditetapkan	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)
87	Pagu belanja non operasional untuk pelaksanaan tuisi belum optimal	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)	(tidak ada sisa risiko)

RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO														
PENETAPAN TUJUAN		IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)				ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)					EVALUASI RISIKO			
Risk Event Nu.	Permasalahan	Sisa Risiko		Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai					Indikator Risiko Utama (IRU)		
1	5	17	18	19	20	21= 18 X 20	22	23	24	25	26			
88	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	15		(tidak ada sisa risiko)		(tidak ada sisa risiko)		(tidak ada sisa risiko)		(tidak ada sisa risiko)				

Terdapat 88 Risiko terdiri dari :

88

53

-44 risiko wajib dilakukan mitigasi (2 risiko tinggi/merah, 15 risiko sedang/orange, 27 risiko sedang /kuning).

-9 risiko Rendah/biru sehingga tidak perlu dimitigasi/tidak perlu disusun rencana pengendaliannya, namun tetap dilakukan pemantauan berkala

-35 risiko yang dapat di kontrol dengan pengendalian intern yang ada (sehingga tidak ada sisa risiko)



## TAHAP-3 : PENANGANAN RISIKO (*TREATMENT RISK*)

Menyusun Rencana Aksi dengan menetapkan opsi penanganan, kegiatan pengendalian, indikator pengendalian, output dan target, jadwal kegiatan pengendalian dan penanggung jawab kegiatan.

Proses ini menghasilkan Rencana Aksi.

PENETAPAN TUJUAN		RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO									
Risk Event Nu.	Permasalahan	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO									
		Sisa Risiko	Opisi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)		
1	5	15	27	28	29	30	31	32	33		
						Output	Target				
22	Terjadinya fraud ataupun Operasi Tangkap tangan	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan/atau kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	mengurangi Kemungkinan	Penyusunan PKPT berbasis risiko	PKPT ABR	1 dokumen	1	Desember	ITWIL dan Sekretaris Itjen (Bag.PPL)		
23	Belum seluruh satuan kerja menyusun Manajemen Risiko	Rendahnya tingkat penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja	mengurangi Kemungkinan	Pemantauan rencana aksi atas tidak lanjut hasil evaluasi penerapan manajemen risiko pada satuan kerja	Laporan pemantauan	1	1	Desember	seluruh Inspektorat Wilayah		
2	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif	Adanya Berita Viral negatif di kementerian	Mengurangi Kemungkinan	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijren ADA, Inwil Berisi, dll)	Laporan kegiatan glorifikasi	2	2	Juni Desember	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretaris Itjen		
3	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan program)	mengurangi Kemungkinan	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijren ADA, Inwil Berisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam penentuan program/kegiatan	Laporan kegiatan glorifikasi	2	2	Juni Desember	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretaris Itjen		
4	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan pengadaan barang jasa)	mengurangi Kemungkinan	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijren ADA, Inwil Berisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam pengadaan barang/jasa	Laporan kegiatan glorifikasi	2	2	Juni Desember	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretaris Itjen		
5	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pemberian rekomendasi)	mengurangi Kemungkinan	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijren ADA, Inwil Berisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam penentuan pemberian rekomendasi	Laporan kegiatan glorifikasi	2	2	Juni Desember	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretaris Itjen		
6	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan kebijakan)	mengurangi Kemungkinan	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijren ADA, Inwil Berisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam penentuan kebijakan	Laporan kegiatan glorifikasi	2	2	Juni Desember	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretaris Itjen		

PENETAPAN TUJUAN		RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO									
RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO		RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO									
Risk Event Nu.	Permasalahan	Sisa Risiko	Opsis Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)		
					Output	Target					
1	5	15	27	28	29	30	31	32	33		
7	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam pengelolaan SDM)	mengurangi Kemungkinan	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijren ADA, Inwil Berisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam penentuan pengelolaan SDM.  Audit Kinerja Tugas Fungsi dan/atau audit tematik terkait pengelolaan SDM  Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dalam pengelolaan SDM, pengelolaan benturan kepentingan, penetapan Duta Integritas, penandatanganan Pakta Integritas, penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan  Pegakan sanksi/hukuman terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya secara agill dan konsisten.	Laporan kegiatan glorifikasi integritas / pencegahan fraud dalam pengelolaan SDM  Rekapitulasi Audit Kinerja Tugas Fungsi Satker  Laporan pengelaan SDM	2  1  1  1	Juni Desember  Desember  Desember	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretariat Itjen			
8	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (vendor memberikan sesuatu kepada pihak terkait)	mengurangi Kemungkinan	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijren ADA, Inwil Berisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam larangan pemberian vendor kepada pegawai	Laporan kegiatan glorifikasi	2	Juni Desember	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretariat Itjen			
9	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemilihan barjas diatur)	mengurangi Kemungkinan	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijren ADA, Inwil Berisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam larangan pengaturan pemenang pengadaan barang/jasa	Laporan kegiatan glorifikasi	2	Juni Desember	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretariat Itjen			



PENETAPAN TUJUAN		RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO									
RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO		RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO									
Risk Event Nu.	Permasalahan	Sisa Risiko	Opisi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)		
					Output	Target					
1	5	15	27	28	29	30	31	32	33		
10	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (kualitas barang tidak sesuai)	mengurangi Kemungkinan	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijren ADA, Inwil Berisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam pembelian barang/jasa yang tidak sesuai spesifikasi)	Laporan kegiatan glorifikasi	2	Juni Desember	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretariat Itjen			
11	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemenang tender punya hubungan kekerabatan)	mengurangi Kemungkinan	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijren ADA, Inwil Berisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam larangan adanya hubungan kekerabatan dengan vendor dan pegawai	Laporan kegiatan glorifikasi	2	Juni Desember	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretariat Itjen			
12	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa barang tidak bermanfaat)	mengurangi Kemungkinan	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijren ADA, Inwil Berisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam pengadaan barang/jasa yang tidak bermanfaat	Laporan kegiatan glorifikasi	2	Juni Desember	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretariat Itjen			
13	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa barang tidak bermanfaat)	mengurangi Kemungkinan	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijren ADA, Inwil Berisi, dll) erkaat dengan perdagangan pengaruh dalam larangan penyalahgunaan anggaran barang/jasa	Laporan kegiatan glorifikasi	2	Juni Desember	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretariat Itjen			
14	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan anggaran	mengurangi Kemungkinan	Audit Ketaatan pengadaan Barang/Jasa, Reviu RKBMN, Reviu RKAKL, Audit Ketaatan Pengelolaan Anggaran	Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Intern	2	Juni Desember	ITWIL I, II, III, IV, V, VI			
15	Masih terdapat catatan dalam Opini WTP yang diberikan BPK atas Laporan keuangan kementerianham	Kurang teridentifikasinya risiko terkait pengelolaan keuangan, barang jasa dalam kegiatan pendampingan LK, Reviu LK, Reviu RKAKL, Reviu BMN, Audit Barang Jasa oleh APIP	mengurangi Kemungkinan	Klasifikasi temuan berulang dalam 3 tahun terakhir (salah satu indikator SPIP terintegrasi)	Dokumen klasifikasi temuan berulang dalam 3 tahun terakhir	2	Juni Desember	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretariat Itjen (Fungsi SIP)			

PENETAPAN TUJUAN		RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO							RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO			
Risk Event Nu.	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)			
		Sisa Risiko	Opsi Penanganan		Output	Target						
1	5	15	27	28	29	30	31	32	33			
1	Masih terdapat cettaan dalam Opini WTP yang diberikan BPK atas Laporan keuangan Kemenkumham	opini atas laporan keuangan Kemenkumham tidak WTP	mengurangi Kemungkinan	1. Menerapkan GRC (Government Risk and Control) pada kegiatan reviu Laporan keuangan, reviu RKBMN, reviu RKAKL, audit pengelolaan keuangan, audit pengelolaan BMN, audit barang dan jasa, reviu PAPBJ 2. Melakukan audit investigatif atas dugaan kerugian negara yang bersifat material	laporan	1	Desember	Inspektur Jenderal				
16	Pemenuhan data dukung belum memadai dan tidak memenuhi kriteria nilai minimal dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM	Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM tidak sesuai dengan Target yang ditetapkan	mengurangi Kemungkinan	Pemantauan satker WBK/WBBM Menyusun rencana kerja TPI Evaluasi satker usulan WBK/WBBM	Surat Irjen hal usulan satker WBK/WBBM	1	November	Koordinator : ITWIL VI				
24	Manajemen Risiko ITJEN hanya sebagai dokumen	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	mengurangi Kemungkinan	Pemantauan penanganan risiko	Laporan Pemantauan penanganan risiko	2	Juni Desember	Tim UPR Koordinator: Bag.PPL				
25	Hasil survei Persepsi Integritas dari KPK belum mencerminkan tingkat integritas Kemenkumham	menurunnya Integritas pelaksanaan tugas	mengurangi Kemungkinan	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Irjen ADA, Irwil Berisi, dll) terkait dengan integritas pelaksanaan tugas. Mengikuti survei SPI-KPK Th.2024 dengan jujur. Sosialisasi hasil SPI pada Kemenkumham Th.2023 dan mekanisme SPI 2024	Laporan kegiatan glorifikasi dan/atau Laporan Sosialisasi Hasil SPI 2023 serta mekanisme 2024 dan/atau kegiatan internalisasi	2	Juni s.d Oktober	ITWIL dan Sekretariat Itjen  Bag.PPL				
26	Satker kurang respon dalam perecapatan tindaklanjut rekomendasi BPK	Rekomendasi hasil pemerikasaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	mengurangi Kemungkinan	Optimalisasi Pemantauan Tindaklanjut Temuan BPK, Rekonsiliasi temuan BPK	Laporan rekonsiliasi temuan BPK	4	Maret, Juni, September Desember	ITWIL dan Sekretariat Itjen (Fungsi SIP)				

PENETAPAN TUJUAN		RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO							RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO			
Risk Event Nu.	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)			
		Sisa Risiko	Opsis Penanganan		Output	Target						
1	5	15	27	28	29	30	31	32	33			
27	Panitia / Pokja pengadaan belum optimal memahami proses pengadaan	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/teelaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	mengurangi Kemungkinan	Melakukan reviu berjenjang dalam menyusun teelaahan aduan	Dokumen berjenjang dalam menyusun teelaahan aduan	1	Januari sd Desember	ITWIL I, II, III, IV, V dan VI				
28	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuaapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/teelaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	mengurangi Kemungkinan	Melakukan reviu berjenjang dalam menyusun teelaahan aduan	Dokumen berjenjang dalam menyusun teelaahan aduan	1	Januari sd Desember	ITWIL I, II, III, IV, V dan VI				
31	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuaapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, reviu, evalausi, was lainnya)	Mengurangi Kemungkinan	Internalisasi/ Arahan Pimpinan tentang ISO SMAP, tentang peningkatan integritas jajaran Ijen. Penerapan sanksi Huksdis	Notula arahan pimpinan. Rekap hukdis pegawai Ijen terkait penyuaapan	4	Triwulan	Insptur Jenderal Inspektur Wilayah Sekretaris Ijen				
32	Pengelblaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	Mengurangi Risiko	penginputan data pengawasan dalam EMAWAS mulai perencanaan s.d pelaporan	Laporan penyelesaian EMAWAS	0.8	Oktober tahun berjalan	Itwil dan Sekretaris ITJEN (Fungsi SIP)				
29	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuaapan beserta mitigasinya yang tepat	terjadinya kasus penyuaapan/ pemberian gratifikasi ilegal/ benturan kepentingan/ penyalahgunaan wewenang/ penyalahgunaan aset oleh APIP, yang terbukti	Mengurangi Kemungkinan	Internalisasi/ Arahan Pimpinan tentang ISO SMAP, tentang peningkatan integritas jajaran Ijen. Penerapan sanksi Huksdis. Reviu teelaahan berjenjang atas usulan hukuman disiplin	Notula arahan pimpinan. Rekap hukdis pegawai Ijen terkait penyuaapan Dokumen reviu berjenjang atas usulan hukuman disiplin	4	Triwulan	Insptur Jenderal Inspektur Wilayah Sekretaris Ijen				

PENETAPAN TUJUAN		RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO							RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO				
Risk Event Nu.	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)			
		Sisa Risiko	15			27	28				29	30	31
1	5	15	27	28	29	30	31	32	33				
30	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	Mengurangi Kemungkinan	Internalisasi/ Arahan Pimpinan tentang ISO SMAP, tentang peningkatan integritas jajaran Itjen. Penerapan sanksi Huksdid. Reviu telaahan berjenjang atas usulan hukuman disipin	Notula arahan pimpinan. Rekap hukdis pegawai Itjen terkait penyusunan Dokumen reviu berjenjang atas usulan laporan fgd	4	Triwulan	Inspetir Jenderal Inspektur Wilayah Sekretaris Itjen					
20	Data dukung ISO SMAP belum terdokumetasi dengan baik	Risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut	Mengurangi dampak	FGD Mitigasi Risiko Layanan Publik Kemenkumham (PAS/Imigrasi/KI/AHU/PP/BPHN)	laporan fgd	1	Desember	Tim UPP ITJEN dan Itwil					
17	Pemenuhan data dukung belum memadai dan tidak memenuhi kriteria nilai minimal dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	Mengurangi Kemungkinan	FGD Mitigasi Risiko Layanan Publik Kemenkumham (PAS/Imigrasi/KI/AHU/PP/BPHN)	laporan fgd	1	Desember	Tim UPP ITJEN dan ITWIL					
34	Kurangnya respon satuan kerja untuk tindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP terkait temuan pengembalian ke kas negara dan temuan administrasi	bertambahnya temuan hasil pengawasan APIP yang belum di tindaklanjuti	Mengurangi dampak	Melakukan koordinasi pemantauan dan rekonsiliasi percepatan tindaklanjut temuan APIP secara berkala	Laporan hasil pemantauan dan/atau rekonsiliasi temuan APIP	4	Triwulan	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretariat Itjen. (Koordinator : JFT Fungsi SIP)					
33	kegiatan terlambat dipertanggung jawabkan	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	mengurangi dampak	Koordinasi ke ITWIL dan Sekretariat untuk membuat LS sesuai kebutuhan kegiatan	Notula Koordinasi	4	Triwulan	Sekretaris Itjen (Fungsi keuangan)					
35	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM ITJEN	Pengembangan dan pola mutasi kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	Mengurangi Kemungkinan	Analisis gap (Kesenjangan) Kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi pegawai	Laporan Analisis gap (Kesenjangan) Kompetensi	2	Juli dan desember tahun berjalan	Sekretariat Itjen (Fungsi Kepegawaian)					

PENETAPAN TUJUAN		RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO							RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO			
Risk Event Nu.	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)			
		Sisa Risiko	Opsi Penanganan		Output	Target						
1	5	15	27	28	29	30	31	32	33			
36	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITWIL	Terdapat banyaknya pengembalian uang perjalanan dinas LS lebih besar dari Rp.50.000.000,-	mengurangi Kemungkinan	Koordinasi dengan ITWIL dan Sekretariat terkait nilai pengembalian uang perjalanan dinas	rekapitulasi Uang pengembalian perjalanan dinas	4	Triwulan	Sekretariat Itjen (Fungsi Keuangan)				
37	Perbedaan data temuan	Data tindak lanjut temuan pengawasan APIP dan temuan eksternal tidak update	Mengurangi Kemungkinan	Rekonsiliasi data temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Internal dan Pemeriksaan Eksternal dengan Inspektorat Wilayah	Berita Acara Rekonsiliasi Data	12	Bulan	Itwil dan Sekretariat Itjen Fungsi SIP				
18	Pemenuhan data dukung SAKIP belum memadai / Saterk belum optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "A"	Mengurangi Kemungkinan	Optimalisasi pemantauan rekomendasi AKIP (salah satu indikator dalam perubahan renstra Itjen).	Laporan rekapitulasi pemantauan rekomendasi AKIP	2	semster	Itwil V (Kordinator)				
40	Adanya benturan kepentingan dalam proses pemberian surat keterangan catatan cela	pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	Mengurangi Kemungkinan	Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentingan Kelompok Substansi Humas dan SIP	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentingan oleh JFT fungsi SIP	1	Maret	Sekretariat Itjen (Fungsi SIP)				
38	Inventarisasi BMN tidak update	Aset BMN hilang	Mengurangi Kemungkinan	Inventarisasi data BMN secara berkala Pemasangan data BMN per ruangan	Laporan Internalisasi BMN	2	Semester	Sekretariat Itjen Bag.Umum)				

PENETAPAN TUJUAN		RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO							RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO			
Risk Event Nu.	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)			
		Sisa Risiko	Opsi Penanganan		Output	Target						
1	5	15	27	28	29	30	31	32	33			
39	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	Mengurangi Kemungkinan	Percepatan Belanja Modal Upload RUP	Laporan belanja Modal	2	Semester	Sekretariat Itjen (Bag.Umum, Pejabat/Pokja Pengadaan)				
41	IACM/KAPIP level 4 belum tercapai	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu KAPIP dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)	Mengurangi Kemungkinan	Evaluasi penerapan enterprise risk management Kementekumham	Laporan Evaluasi	1	Desember	ITWIL III (Koordinator)				
21	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif	Potensi pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	mengurangi Kemungkinan	Sosialisasi grafitikasi dan monitoring pelaporan grafitikasi, meningkatkan kompetensi auditor melalui diklat teknis pengawasan	Laporan Sosialisasi/ monev grafitikasi Laporan peningkatan kompetensi	1	Desember	ITWIL Sekretariat Itjen *Fungsi Humas serta Fungsi SDM				
42	Perbedaan data temuan	Data Hukuman Disiplin tidak update	Mengurangi Kemungkinan	Rekon data Hukuman disiplin dengan Auditor, Unit Utama, Kanwil dan Biro Kepegawaian	Laporan Kegiatan Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin	4	Triwulan	ITWIL I, II, III, IV, V, VI dan Sekretariat Itjen (Fungsi SIP)				
43	PKPT berbasis risiko belum diterapkan secara optimal sesuai Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR)	Satker yang berisiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT	Mengurangi Kemungkinan	Pemetaan risiko satuan kerja Kemenkumham oleh Inspektorat Wilayah	Dokumen pemetaan risiko satuan kerja masing-masing Inspektorat Wilayah	1	Oktober	ITWIL I, II, III, IV, V, dan VI				
19	Pelaksanaan RB ITJEN belum terdokumentasi dengan baik	RKT RB satuan kerja belum sepenuhnya terpenuhi 100% per triwulan	Mengurangi Kemungkinan	Sosialisasi / internalisasi pemenuhan kegiatan/data dukung RKT RB Itjen	Laporan internalisasi	4	Triwulan	Sekretariat Itjen (Koordinator : Bag.PPL)				
44	Prosedur pencegahan dan penanganan bencana belum dipahami oleh seluruh pegawai	Potensi terjadinya bencana/musibah (Kebakaran, Pencurian dll)	Mengurangi Kemungkinan	Penyediaan pemadam Kebakaran, Alarm kebakaran Tangga Darurat, P3K dan obat-obatan Memutuskan aliran listrik bila libur lama/hari raya	Laporan pengamanan musibah	2	Semester	Bagian Umum				

PENETAPAN TUJUAN		RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO							RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO				
Risk Event Nn.	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)			
		Sisa Risiko	15			Output	Target				31	32	33
1	5	15	27	28	29	30	31	32	33				
45	Perbedaan data temuan	menghilangkan data temuan intrenal dan/atau	Mengurangi Kemungkinan	1. Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentingan Kelompok Subsansi Humas dan SIP 2. Melaksanakan Maintenance Firewall atas data-data Inspektorat Jenderal	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentingan JFT Fungsi SIP	1	Maret	JFT Fungsi SIP					
46	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur	terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	Mengurangi Kemungkinan	Penggunaan ecatalog Lelang terbuka Pakta Integritas penyedia dan pokja/pejabat pengadaan	Pakta Integritas Penyedia dan pejabat/pokja pengadaan	2	Maret dan Oktober	Bagian Umum Pokja/Pejabat pengadaan					
47	Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan	salah saji dalam laporan keuangan tjién	Mengurangi Kemungkinan	Rekon LK antara pengelola SAIBA dan pengelola keuangan	Kegiatan rekon keuangan dan BMN Laporan keuangan per semester	2	Januari dan Juli	JFT Fungsi Pengelola APBN					
48	Efektifitas kerjasama belum optimal	Salah satu pihak mitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU	Mengurangi Kemungkinan	Dokumen MOU dan/atau PKS	Laporan	1	Oktober	JFT Pranata Humas					
49	Terjadinya benturan kepentingan dalam pecepatan pemberian anggaran kegiatan	menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	Mengurangi Kemungkinan	Rekonsiliasi keuangan dengan user Itwil dan sekretariat	Laporan rekonsiliasi keuangan	4	Triwulan	JFT Pengelola APBN					
50	Belum memiliki grand design Teknologi Informasi Pengawasan	merubah/ menghilangkan data dalam server	Mengurangi Kemungkinan	1. Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentingan Kelompok Subsansi Humas dan SIP 2. Melaksanakan Maintenance Firewall atas data-data Inspektorat Jenderal	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentingan.	1	Maret	Sekretariat Itjen (Fungsi SIP)					
51	Layanan SIPIDU belum optimal	Pengaduan tidak diproses sesuai SOP	Mengurangi Kemungkinan	Rekon pengaduan dengan satuan kerja	Laporan rekon pengaduan	4	Triwulan	Sekretariat Itjen (Fungsi Keuangan)					
52	Manajemen aset yang belum optimal	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	Mengurangi Kemungkinan	Rekon data BMN dengan Itwil dan Sekretariat Laporan Inventarisasi BMN	Laporan rekon BMN Data Inventaris BMN	1	Desember	Bagian Umum					

PENETAPAN TUJUAN		RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO							
RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO		RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO							
Risk Event Nu.	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
		Sisa Risiko	Opsis Penanganan		Output	Target			
1	5	15	27	28	29	30	31	32	33
53	Salah saji yang material pada Laporan Keuangan Ijen	Posisi Keuangan tidak mencerminkan nilai sebenarnya pada akhir periode pelaporan	Mengurangi Risiko	Rekon data keuangan tingkat kementerian per semester	Berita acara rekon data keuangan tingkat kementerian	2	2 Bulan Februari 2023 dan Juli 2023	Sekretaris IT/JEN (Fungsi Keuangan)	





## TAHAP-4 :

### PEMANTAUAN RISIKO (*TREATMENT RISK*)

Menyusun Rencana Aksi dengan menetapkan opsi penanganan, kegiatan pengendalian, indikator pengendalian, output dan target, jadwal kegiatan pengendalian dan penanggung jawab kegiatan.

Proses ini menghasilkan Rencana Aksi.

PENETAPAN TUJUAN		RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO				RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO				PEMANTAUAN DAN REVU				
Risk Event NUL	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		EVALUASI RISIKO		RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO		Indikator Pengendalian		Indikator Risiko		Risiko Residu	Ket	
		Sisa Risiko	Profil Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)	Indikator Risiko	Output	Target	Realisasi	%	Realisasi	%			
1	5	15	22	25	26	28	29	30	34	35= 34 / 26	36= 35 * 26 (realisasi indikator Pengendalian* batas aman)	37= 36 / 26	38 = (37 X toleransi risiko / kolom 24)	39 (kaitkan risiko residu dg sasaran)
22	Terjadinya fraud ataupun Operasi Tangkap tangan	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan/atau kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	Merah / Sangat Tinggi	Jumlah kejadian OTT pegawai Kementekumham	0	Penyusunan PKPT berbasis risiko	PKPT ABR	1 dokumen						
23	Belum seluruh satuan kerja menyusun Manajemen Risiko	Rendahnya tingkat penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja	Merah / Sangat Tinggi	Persentase evaluasi manajemen risiko dilakukan satuan kerja yang belum dilakukan evaluasi manajemen risiko	82%	Pemantauan rencana aksi atas tidak lanjut hasil evaluasi penerapan manajemen risiko pada satuan kerja	Laporan pemantauan	1						
2	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif	Adanya Berita Viral negatif di kementekumham	Orange / Tinggi	Berita viral negatif di kementekumham	1	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijen ADA, Inwil Benisi, dll)	Laporan kegiatan glorifikasi	2						
3	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan program)	Orange / Tinggi	Jumlah kejadian kasus Fraud terkait adanya perdagangan pengaruh dalam penentuan program, yang terbukti	0	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijen ADA, Inwil Benisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam penentuan program/kegiatan	Laporan kegiatan glorifikasi	2						
4	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan perdagangan barang jasa)	Orange / Tinggi	Jumlah kejadian kasus Fraud terkait adanya perdagangan pengaruh dalam penentuan perdagangan barang jasa yang terbukti	0	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijen ADA, Inwil Benisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam pengadaan barang/jasa	Laporan kegiatan glorifikasi	2						
5	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan pemberian rekomandasi)	Orange / Tinggi	Jumlah kejadian kasus Fraud terkait adanya perdagangan pengaruh dalam penentuan pemberian rekomandasi, yang terbukti	0	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijen ADA, Inwil Benisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam penentuan pemberian rekomandasi	Laporan kegiatan glorifikasi	2						
6	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam penentuan kebijakan)	Orange / Tinggi	Jumlah kejadian kasus Fraud terkait adanya perdagangan pengaruh dalam penentuan kebijakan, yang terbukti	0	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijen ADA, Inwil Benisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam penentuan kebijakan	Laporan kegiatan glorifikasi	2						

PENETAPAN TUJUAN		RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO				RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO				PEMANTAUAN DAN REVU					
Risk Event NuL	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		EVALUASI RISIKO		RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO				Indikator Pengendalian		Indikator Risiko		Risiko Residu	Ket
		Sisa Risiko	Profil Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)	Indikator Risiko	Kegiatan Pengendalian	Output	Target	Realisasi	%	Realisasi	%			
1	5	15	22	25	26	0	28	29	30	34	35= 34 / 26	36= 35 * 26 (realisasi indikator Pengendalian)* batas aman)	37= 36 / 26	38 = (37 X toleransi risiko / kolom 24)	39 (kalkulasi risiko dg sasaran)
7	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam Perdagangan pengaruh (dalam pengelolaan SDM)	Orange / Tinggi	Jumlah kejadian kasus Fraud terkait adanya perdagangan pengaruh dalam penentuan pengelolaan SDM, yang terbukti	0	*Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijen ADA, Irwil Benisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam penentuan pengelolaan SDM.  *Audit Kinerja Tugas Fungsi dan/atau audit tematik terkait pengelolaan SDM  *Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenal sistem merit dalam pengelolaan SDM, pengelolaan benturan kepentingan, penetapan Duta Integritas, pendanaan Pakta Integritas, penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan  *Penegakan sanksi/hukuman terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya secara adil dan konsisten.	Lap glorifikasi integritas / pencegahan fraud dalam pengelolaan SDM  Rekapitulasi Audit Kinerja tuis Saker  Laporan pengelolaan SDM  Rekap hukdis pelanggaran kode etik/ regulasi terkait SDM	2  1  1  1  1							
8	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (vendor memberikan sesuatu kepada pihak terkait)	Orange / Tinggi	Jumlah kejadian Fraud (vendor memberikan sesuatu kepada pihak terkait, yang terbukti	0	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijen ADA, Irwil Benisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam larangan pemberian vendor kepada pegawai	Laporan kegiatan glorifikasi	2							
9	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemilihan barjas diatur)	Orange / Tinggi	Jumlah kejadian Fraud terkait pemilihan barjas diatur, yang terbukti	0	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijen ADA, Irwil Benisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam larangan pengaturan pemenang pengadaan barang/jasa	Laporan kegiatan glorifikasi	2							
10	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (kualitas barang tidak sesuai)	Orange / Tinggi	Jumlah kejadian Fraud terkait vendor memberikan sesuatu kualitas barang tidak sesuai, yang terbukti	0	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijen ADA, Irwil Benisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam pembelian barang/jasa yang tidak sesuai spesifikasi	Laporan kegiatan glorifikasi	2							
11	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa (pemenang tender punya hubungan kekerabatan)	Orange / Tinggi	Jumlah kejadian Fraud terkait hubungan kekerabatan dengan vendor, yang terbukti	0	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijen ADA, Irwil Benisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam larangan adanya hubungan kekerabatan dengan vendor dan pegawai	Laporan kegiatan glorifikasi	2							

PENETAPAN TUJUAN		RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO				RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO				PEMANTAUAN DAN REVU						
Risk Event NUL	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		EVALUASI RISIKO		RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO				Indikator Pengendalian		Indikator Risiko		Risiko Residu	Ket	
		Sisa Risiko	Profil Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)	Indikator Risiko	Output	Target	Realisasi	%	Realisasi	%					
1	5	15	22	25	26			28	29	30	34	35= 34 / 26	36= 35 * 26 (realisasi indikator Pengendalian* batas aman)	37= 36 / 26	38 = (37 X toleransi risiko / kolom 24)	39 (kaitkan risiko residu dg sasaran)
12	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa barang tidak bermanfaat	Orange / Tinggi	Jumlah kejadian Fraud terkait barang jasa yang tidak bermanfaat, yang terbukti	0	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijen ADA, Irwil Benisi, dll) terkait dengan perdagangan pengaruh dalam pengadaan barang/jasa yang tidak bermanfaat	Laporan kegiatan glorifikasi	2								
13	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan barang dan jasa barang tidak bermanfaat	Orange / Tinggi	Jumlah kejadian Fraud terkait penyelenggaraan anggaran barjas, yang terbukti	0	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijen ADA, Irwil Benisi, dll) erkaat dengan perdagangan pengaruh dalam larangan penyalahgunaan anggaran barang/jasa	Laporan kegiatan glorifikasi	2								
14	Indeks hasil Survei Penilaian Integritas menurun	Fraud dalam pengelolaan anggaran	Orange / Tinggi	Jumlah kejadian fraud dalam pengelolaan anggaran yang terbukti	0	Audit Ketaatan pengadaan Barang/Jasa, Revu RKBMN, Revu RKAKL, Audit Ketaatan Pengelolaan Anggaran	Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Intern	2								
15	Masih terdapat cataan dalam Opini WTP yang diberikan BPK atas Laporan keuangan kementerian	Kurang teridentifikasi risiko terkait pengelolaan keuangan, barang jasa dalam kegiatan pendampingan LK, Revu LK, Revu RKAKL, Revu BMN, Audit Barang Jasa oleh APIP	Orange / Tinggi	Jumlah jenis temuan berulang dan tahun sebelumnya dalam LHP BPK	5	Klasifikasi temuan berulang dalam 3 tahun terakhir (salah satu indikator 'SHP' terintegrasi)	Dokumen Klasifikasi temuan berulang dalam 3 tahun terakhir	2								
1	Masih terdapat cataan dalam Opini WTP yang diberikan BPK atas Laporan keuangan kementerian	opini atas laporan keuangan kementerian tidak WTP	Orange / Tinggi	temuan material lebih dari batas aman (5%)	5%	1. Menerapkan GRC (Government Risk and Control) pada kegiatan revu Laporan keuangan, revu RKBMN, revu RKAKL, audit pengeluaran keuangan, audit pengelolaan BMN, audit barang dan jasa, revu PABU 2. Melakukan audit investigatif atas dugaan kerugian negara yang bersifat material	laporan	1								
16	Pemenuhan data dukung belum memadai dan tidak memenuhi kriteria nilai minimal dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM	Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM tidak sesuai dengan Target yang ditetapkan	Kuning	Persentase saiker yang tidak lolos WBK/WBBM dan total saiker yang diajukan ke TPN	10%	Pemantauan saiker WBK/WBBM Menyusun rencana kerja TPI Evaluasi saiker usulan WBK/WBBM	Surat Ijen hal usulan saiker WBK/WBBM	1								
24	Manajemen Risiko ITJEN hanya sebagai dokumen	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	Kuning	Persentase realisasi kegiatan pengendalian risiko IRU yang tidak dilaksanakan /IRU yang belum tercapai	10%	Pemantauan penanganan risiko	Laporan Pemantauan penanganan risiko	2								

PENETAPAN TUJUAN		RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO				RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO				PEMANTAUAN DAN REVU									
Risk Event Nu.	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		EVALUASI RISIKO		RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO				Indikator Pengendalian		Indikator Risiko		Risiko Residu	Ket				
		Sisa Risiko	Profil Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman	Kegiatan Pengendalian	Output	Target	Realisasi	%	Realisasi	%							
1	5	15	22	25	26	menurunnya Integritas pelaksanaannya tugas	Kuning	Jumlah kejadian fraud dalam integritas pelaksanaan tugas yang terbukti	0	28	29	30	34	35= 34 / 26	36= 35 * 26 (realisasi indikator Pengendalian* batas aman)	37= 36 / 26	38 = (37 X toleransi risiko / kolom 24)	39 (kaitkan risiko residu dg sasaran)	
25	Hasil survei Persepsi Integritas dan KPK belum mencerminkan tingkat integritas Kemenkumham	Integritas pelaksanaannya tugas					Kuning	Jumlah kejadian fraud dalam integritas pelaksanaan tugas yang terbukti	0	Kegiatan Glorifikasi Peningkatan Integritas (FGD, Sosialisasi, Gerbang Transisi, Ijen ADA, Irwil Benisi, dll) terkait dengan integritas pelaksanaan tugas. Mengikuti survei SPI-KPK Th.2024 dengan jujur. Sosialisasi hasil SPI pada Kemenkumham Th.2023 dan mekanisme SPI 2024	Laporan kegiatan glorifikasi dan/atau Laporan Sosialisasi Hasil SPI 2023 serta mekanisme 2024 dan/atau kegiatan internalisasi	2							
26	Satker kurang respon dalam percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	Kuning	Presentase temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	40%					Optimalisasi Pemantauan Tindaklanjuti Temuan BPK, Rekonsiliasi temuan BPK	Laporan rekonsiliasi temuan BPK	4							
27	Panitia / Pokja pengadaan belum optimal memahami proses pengadaan	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/teelaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	Kuning/ sedang	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/teelaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	0					Melakukan reviu berjenjang dalam menyusun telaahan aduan	Dokumen berjenjang dalam menyusun telaahan aduan	1							
28	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/teelaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	Kuning/ sedang	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/teelaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	0					Melakukan reviu berjenjang dalam menyusun telaahan aduan	Dokumen berjenjang dalam menyusun telaahan aduan	1							
31	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, reviu, evalausi, was lainnya)	Kuning/ sedang	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima penyusunan yang terbukti pada Pelaksanaan Audit	0					Internalisasi/ Arahan Pimpinan tentang ISO SMA-P, tentang peningkatan integritas jajaran Ijen. Penerapan sanksi Hukdis	Notula arahan pimpinan. Rekap hukdis pegawai Ijen terkait penyusunan	4							

PENETAPAN TUJUAN		RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO				RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO				PEMANTAUAN DAN REVU							
Risk Event No.	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		EVALUASI RISIKO		RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO				Indikator Pengendalian		Indikator Risiko		Risiko Residu	Ket		
		Sisa Risiko	Profil Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)	Indikator Risiko	Kegiatan Pengendalian	Output	Target	Realisasi	%	Realisasi	%					
1	5	15	22	25	26			28	29	30	34	35= 34 / 26	36= 35 * 26 (realisasi indikator Pengendalian* batas aman)	37= 36 / 26	38 = (37 X toleransi risiko / kolom 24)	39 (kalkulasi risiko residu dg sasaran)	
32	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	Kuning	data Simwas dan dashboard pimpinan terupdate berkala tiap bulan	12	penginputan data pengawasan dalam EMAWAS mulai perencanaan s.d pelaporan	Laporan penyelesaian EMAWAS	0,8									
29	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	terjadinya kasus penyusunan/pemberian gratifikasi ilegal/bururan kepentingan/penyalahgunaan wewenang/penyalahgunaan aset oleh APIP yang terbukti	Kuning/ sedang	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk Kepentingan pribadi atau golongan .	0	Internalisasi/ Arahan Pimpinan tentang ISO SMAP , tentang peningkatan integritas jajaran Ijen, Penerapan sanksi Hukudts, Reviu telaahan berjenjang atas usulan hukuman disiplin terkait penyusunan	Notula arahan pimpinan, Rekap hukdis pegawai Ijen terkait penyusunan Dokumen reviu berjenjang atas	4									
30	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyusunan beserta mitigasinya yang tepat	Polensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk Kepentingan pribadi atau golongan	Kuning/ sedang	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk Kepentingan pribadi atau golongan	0	Internalisasi/ Arahan Pimpinan tentang ISO SMAP , tentang peningkatan integritas jajaran Ijen, Penerapan sanksi Hukudts, Reviu telaahan berjenjang atas usulan hukuman disiplin	Notula arahan pimpinan, Rekap hukdis pegawai Ijen terkait penyusunan Dokumen reviu	4									
20	Data dukung ISO SMAP belum terdokumnetasi dengan baik	Risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut	Kuning/ sedang	Persentase peningkatan kejadian kasus pungli/gratifikasi/korupsi yang terungkap dibandingkan tahun sebelumnya	0	FGD Mitigasi Risiko Layanan Publik Kemerkumham (PAS/Imigrasi/KIWA/HU/PP/BPHN)	Laporan fgd	1									
17	Pemenuhan data dukung belum memadai dan tidak memenuhi kriteria nilai minimal dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBEM	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	Kuning/ sedang	Persentase peningkatan kejadian kasus pungli/gratifikasi/korupsi yang terungkap dibandingkan tahun sebelumnya	0	FGD Mitigasi Risiko Layanan Publik Kemerkumham (PAS/Imigrasi/KIWA/HU/PP/BPHN)	laporan fgd	1									
34	Kurangnya respon satuan kerja untuk merindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP terkait temuan pengembalian ke kas negara dan temuan administrasi	bertambahnya temuan hasil pengawasan APIP yang belum di tindaklanjuti	Kuning/ sedang	Persentase temuan pengawasan APIP yang belum diindaklanjuti	15%	Melakukan koordinasi pemantauan dan rekonsiliasi percepatan tindaklanjut temuan APIP secara berkala dan/atau rekonsiliasi temuan APIP	Laporan hasil pemantauan dan/atau rekonsiliasi temuan APIP	4									
33	kegiatan terlambat dipertanggung jawabkan	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	Kuning	Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA Ijen	2%	Koordinasi ke ITWIL dan Sekretariat untuk membuat LS sesuai kebutuhan kegiatan	Notula Koordinasi	4									

PENETAPAN TUJUAN		RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO				RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO				PEMANTAUAN DAN REVU							
Risk Event NUL	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		EVALUASI RISIKO		RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO				Indikator Pengendalian		Risiko Residu	Ket				
		Sisa Risiko	Profil Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman	Kegiatan Pengendalian	Output	Target	Realisasi	%	Realisasi			%			
1	5	15	22	25	26			28	29	30	34	35= 34 / 26	36= 35 * 26 (realisasi indikator Pengendalian)* batas aman)	37= 36 / 26	38 = (37 X toleransi risiko / kolom 24)	39 (kaitkan risiko residu dg sasaran)	
35	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM ITJEN					Pengembangan dan pola mutasi kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya				50%	Analisis gap (Kesenjangan) Kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi pegawai						
36	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITWIL					Terdapat banyaknya pengembalian uang perjalanan dinas LS tebih besar dari Rp.50.000.000.-				2%	rekapitulasi Liang pengembalian perjalanan dinas						
37	Perbedaan data temuan					Data tindak lanjut temuan pengawasan APP dan temuan eksternal tidak update					Berita Acara Rekonsiliasi Data	12					
18	Pemenuhan data dukung SAKIP belum memadai / Saker belum optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP					Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "A"				50,0%	Laporan rekapitulasi pemantauan rekomendasi AKIP	2					
40	Adanya benturan kepentingan dalam proses pemberian surat keterangan catatan cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai					Adanya kasus pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai				0	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Pernyataan tidak benturan oleh JFT fungsi SIP	1					
38	Inventarisasi BMN tidak update					Aset BMN hilang				0	Laporan Inventarisasi BMN	2					
39	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau tertambat direalisasikan di tahun berjalan					Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau tertambat direalisasikan di tahun berjalan				10% dari total BM	Laporan belanja Modal	2					

PENETAPAN TUJUAN		RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO				RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO				PEMANTAUAN DAN REVU					
Risk Event No.	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		EVALUASI RISIKO		RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO				Indikator Pengendalian		Indikator Risiko		Risiko Residu	Ket
		Sisa Risiko	Profil Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)	Indikator Risiko	Kegiatan Pengendalian	Output	Target	Realisasi	%	Realisasi	%			
1	5	15	22	25	26	28	29	30	34	35= 34 / 26	36= 35 * 26 (realisasi indikator Pengendalian)* batas aman)	37= 36 / 26	38 = (37 X toleransi risiko / kolom 24)	39 (kalkulasi residu dg sasaran)	
41	IACM/KAPIP level 4 belum tercapai	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu KAPIP dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (A-AIP)	Kuning/ sedang	Penyusunan PKPT berbasis risiko	1	Evaluasi penerapan enterprise risk management Kemenkumham	Laporan Evaluasi	1							
21	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif	Potensi pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Kuning/ Sedang	Jumlah kejadian LHA terbit tidak menginformasikan kondisi di lapangan / kondisi yang sebenarnya	2	Sosialisasi gratifikasi dan monitoring pelaporan gratifikasi, peningkatan kompetensi auditor melalui diklat teknis pengawasan	Laporan Sosialisasi/ money gratifikasi	1							
42	Perbedaan data temuan	Data Hukuman Disiplin tidak update	Kuning/ Sedang	Persentase kesalahan rekap data hukuman disiplin untuk bahan pimpinan, yang tidak update	0%	Rekon data Hukuman disiplin dengan Auditor, Unit Utama, Karwil dan Biro Kepegawalan	Laporan Kegiatan Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin	4							
43	PKPT berbasis risiko belum diterapkan secara optimal sesuai Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR)	Saker yang berisiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT	Kuning/ sedang	Persentase saker yang berisiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT	5%	Pemetaan risiko satuan kerja Kemenkumham oleh Inspektorat Wilayah	Dokumen pemetaan risiko satuan kerja masing-masing Inspektorat Wilayah	1							
19	Pelaksanaan RB IT JEN belum terdokumentasi dengan baik	RKT RB satuan kerja belum sepenuhnya terpenuhi 100% per triwulan	Kuning/ sedang	Persentase RKT RB satker yang belum terpenuhi s.d Desember tahun berjalan	15%	Sosialisasi / internalisasi pemenuhan kegiatan/data dukung RKT RB Itjen	Laporan internalisasi	4							
44	Prosedur pencegahan dan penanganan bencana belum dipahami oleh seluruh pegawai	Potensi terjadinya bencana/musibah (Kebakaran, Pencurian dll)	Kuning/ Sedang	Jumlah kejadian bencana/musibah di kantor	0	Penyediaan pemadam Kebakaran, Alarm kebakaran Tangga Darurat, P3K dan obat-obatan Memutuskan aliran listrik bila libur lama/hari raya	Laporan pengamanan musibah	2							
45	Perbedaan data temuan	menghilangkan data temuan internal dan/atau eksternal	Biru/ rendah	Jumlah kejadian menghilangkan data temuan internal dan/atau eksternal	0	1. Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentingan Kelompok Substansi Humas dan SIP 2. Meleaksakan Maintenance Firewall atas data-data Inspektorat Jenderal	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentingan	1							
46	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur	terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	Biru/ Rendah	Jumlah kasus menerima suap dalam pengadaan untuk menguntungkan salah satu peserta pengadaan	0	Penggunaan ecatalog Lelang terbuka Pakta Integritas penyedia dan pokok/pejabat pengadaan	Pakta Integritas Penyedia dan pejabat/pokja pengadaan	2							
47	Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan	salah saji dalam laporan keuangan itjen	Biru/ Rendah	Jumlah kejadian salah saji dalam LK Itjen	0	Rekon LK antara pengelola SAIBA dan pengelola keuangan	Kegiatan rekon keuangan dan BMN	2							
48	Efektifitas kerjasama belum optimal	Salah satu pihak mitra tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU	Biru/ Rendah	Jumlah kejadian Mitra kerja yang melanggar MOU / PKS	0	Dokumen MOU dan/atau PKS	Laporan	1							



PENETAPAN TUJUAN		RISK ASSESSMENT / PENILAIAN RISIKO				RISK TREATMENT / PENANGANAN RISIKO				PEMANTAUAN DAN REVU					
Risk Event No.	Permasalahan	IDENTIFIKASI RISIKO (REGISTER RISIKO)		EVALUASI RISIKO		RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO				Indikator Pengendalian		Indikator Risiko		Risiko Residu	Ket
		Sisa Risiko	Profil Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)	Indikator Risiko	Batas Aman	Kegiatan Pengendalian	Output	Target	Realisasi	%	Realisasi	%		
1	5	15	22	25	26		28	29	30	34	35= 34 / 26	36= 35 * 26 (realisasi indikator Pengendalian* batas aman)	37= 36 / 26	38 = (37 X toleransi risiko / kolom 24)	39 (kaitkan risiko residu dg sasaran)
49	Terjadinya benturan kepentingan dalam percepatan pemberian anggaran kegiatan	menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	Biru/ Rendah	Jumlah kejadian Pemberian layanan Keuangan tidak sesuai SOP	1	Rekonsiliasi keuangan dengan user Itwil dan sekretariat	Laporan rekonsiliasi keuangan	4							
50	Belum memiliki grand design Teknologi Informasi Pengawasan	merubah/ menghilangkan data dalam server	Biru/ Rendah	Jumlah kejadian terbukti merubah/ menghilangkan data dalam server	0	1. Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentingan Kelompok Substansi Humas dan SIP 2. Melaksanakan Maintenance Firewall atas data-data Inspektorat Jenderal	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan	1							
51	Layanan SIPIDU belum optimal	Pengaduan tidak diproses sesuai SOP	Biru/ Rendah	Jumlah pengaduan yang tidak diproses	0	Rekon pengaduan dengan satuan kerja	Laporan rekon pengaduan	4							
52	Manajemen aset yang belum optimal	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	Biru / Rendah	persentase aset BMN yang belum dilakukan penetapan status	5%	Rekon data BMN dengan Itwil dan Sekretariat Laporan Inventarisasi BMN	Laporan rekon BMN Data Inventaris BMN	1							
53	Salah saji yang material pada Laporan Keuangan lijen	Posisi Keuangan tidak mencerminkan nilai sebenarnya pada akhir periode pelaporan	Biru/ Rendah	Jumlah kesalahan perhitungan dan pembebanan akun pada jurnal penyesuaian	0	Rekon data keuangan tingkat kementerian per semester	Berita acara rekon data keuangan tingkat kementerian	2							

## TREN RISIKO SATU TAHUN ANGGARAN 2024

TREN	PROFIL RISIKO				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
RISK EVENT NUMBER'S					
Januari 2024		45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53	16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	22, 23
Hasil Pemantauan Semester-1 (Juni 2024)	Setelah dilakukan pemantauan di Semester-1 Th.2024, maka hasilnya diinput dalam matrik ini				
Hasil Pemantauan Semester-2 (Desember 2024)	Setelah dilakukan pemantauan di Semester-2 Th.2024, maka hasilnya diinput dalam matrik ini				

**KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO**

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

**KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO**

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Individu	Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau berkaitan dengan Risiko Kepatuhan	1
2	Satuan Kerja/ UPT	Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan dengan Risiko Pelaporan	2
3	Kantor Wilayah/ Unit Eselon II	Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan dengan Risiko Operasional	3
4	Unit Eselon I	Berdampak terhadap Unit Eselon I atau berkaitan dengan Risiko Keuangan dan Risiko Hukum	4
5	Kementerian	Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan	5

Range	Warna	Level Risiko
21-25	MERAH	sangat tinggi
16-20	ORANGE	tinggi
11-15	KUNING	sedang
6-10	BIRU	rendah
1-5	HIJAU	sangat rendah

Matriks analisis terhadap tingkat Risiko (profil Risiko):

Matriks Analisis Risiko		DAMPAK				
Matriks Analisis Risiko		1	2	3	4	5
Risiko		Pegawai	Satke	Kanwil	Unit	Keme
		1	R/IIPT	/ESEL	Utama	nteri
5	PASTI	5	10	15	20	25
4	Hampir Pasti	4	8	12	16	20
3	Moderat	3	6	9	12	15
2	Kecil	2	4	6	8	10
1	Sangat Kecil	1	2	3	4	5

  

Warna	Level	Level dimulaidari	Deskripsi
	Status Risiko	Status Risiko	Status Risiko
Merah	5	21	Sangat Tinggi
Oranye	4	16	Tinggi
Kuning	3	11	Sedang
Biru	2	6	Rendah
Hijau	1	1	Sangat Rendah



## **KEBERHASILAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO BERTUMPU PADA :**

- 1. RISK CULTURE AWARENESS**
- 2. HUMAN STRATEGY**
- 3. LEADERSHIP COMMITMENT**